

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SEMBAKO DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT  
DI DESA SUKADADI KECAMATAN GEDONG TATAAN  
KABUPATEN PESAWARAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AISYAH PUTRI NUR ISTIQOMAH  
2216011049**



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SEMBAKO DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT  
DI DESA SUKADADI KECAMATAN GEDONG TATAAN  
KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh**

**AISYAH PUTRI NUR ISTIQOMAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SEMBAKO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA SUKADADI KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

**AISYAH PUTRI NUR ISTIQOMAH**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sembako meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan KPM dari 30% menjadi 50% sehingga peningkatan ini perlu diperhatikan dan didorong agar kesejahteraan sosial yang diharapkan terealisasi secara nyata berdasarkan pengakuan informan sekitar 70% KPM yang cukup terbantu dengan Program Bantuan Sembako. Hasil analisis menggunakan teori Struktural Fungsional (AGIL), dimana aspek paling kuat terletak pada fungsi *Adaptation* (A), yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat melalui distribusi sumberdaya yang tepat. *Goal Attainment* (G) dalam penelitian ini belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara menyeluruh karena terbatasnya dana anggaran yang diterima masyarakat. Pada aspek *Integration* (I), dan *Latency* (L) juga menjadi bagian yang paling lemah, karena *Integration* (I) terdapat miskomunikasi antar pihak, keterlambatan informasi ke Desa dan perbedaan pendapat terkait siapa yang layak menerima bantuan sehingga terjadi ketidaksesuaian data penerima dan kecemburuan antar masyarakat. Sementara itu, *Latency* (L) menunjukkan kelemahan dalam pemeliharaan nilai dan keberlanjutan program karena kurangnya kontrol pada masyarakat yang menerima bantuan. Oleh karena itu, agar evaluasi dan monitoring program dapat berjalan sesuai kebutuhan, maka diperlukan adanya peningkatan koordinasi antar pihak terkait, serta penambahan program sosialisasi kepada masyarakat agar program dapat berjalan lebih optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kesejahteraan Sosial, Program Bantuan Sembako

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF THE BASIC FOOD ASSISTANCE PROGRAM TO ENHANCE COMMUNITY SOCIAL WELFARE IN SUKADADI VILLAGE GEDONG TATAAN DISTRICT PESAWARAN REGENCY**

*By*

**AISYAH PUTRI NUR ISTIQOMAH**

*This study aims to analyze the implementation of the Basic Food Assistance Program in improving the social welfare of the community in Sukadadi Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that basic food assistance increases the fulfillment of KPM food needs from 30% to 50% so that this increase needs to be considered and encouraged so that the expected social welfare is realized in reality based on the recognition of informants around 70% of KPM who are quite helped by the Basic Food Assistance Program. The results of the analysis use the Structural Functional Theory (AGIL), where the strongest aspect lies in the Adaptation function (A), which is able to adjust to environmental conditions and community needs through the distribution of appropriate resources. Goal Attainment (G) in this study has not been able to meet household needs as a whole due to limited budget funds received by the community. In the aspects of Integration (I), and Latency (L) are also the weakest parts, because Integration (I) there is miscommunication between parties, delays in information to the Village and differences of opinion regarding who is eligible to receive assistance resulting in inconsistencies in recipient data and jealousy between communities. Meanwhile, Latency (L) indicates weaknesses in maintaining the program's value and sustainability due to a lack of control over the communities receiving assistance. Therefore, to ensure program evaluation and monitoring are carried out as needed, increased coordination between relevant parties and additional community outreach programs are needed to optimize the program's operation.*

**Keywords:** *Implementation, Basic Food Assistance Program, Social Welfare*

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN  
SEMBAKO DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL  
MASYARAKAT DI DESA SUKADADI  
KECAMATAN GEDONG TATAAN  
KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa

: **Aisyah Putri Nur Istiqomah**

Nomor Induk Mahasiswa

: **2216011049**

Program Studi

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Erna Rochana, M.Si.**  
NIP. 196706231998022001

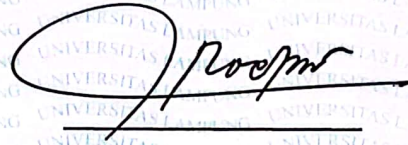
**2. Ketua Jurusan Sosiologi**

**Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si**  
NIP. 197704012005012003

**MENGESAHKAN**

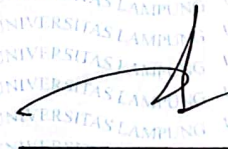
**1. Tim Penguji  
Ketua**

**: Dr. Erna Rochana, M.Si.**



**Penguji Utama**

**: Dra. Anita Damayantie, M.H.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zamal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 127608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Mei 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026  
Yang membuat pernyataan,



Aisyah Putri Nur Istiqomah  
NPM. 2216011049

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Air Kubang Timur, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus pada 13 Februari 2003. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Supriyatno, M.Pd., dan Ibu Sismawati, S.Pd. Pendidikan formalnya dimulai di SDN 01 Air Kubang Timur dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Air Nanningan dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MA Al-Muhsin dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Lampung, pada Program Studi S-1 Sosiologi melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Saat menempuh Pendidikan di Program Studi Sosiologi ini, penulis menjadi anggota Biro Rohani Mahasiswa (Birohmah) pada tahun 2022-2023, serta menjadi anggota pada divisi Kemuslimahan pada Forum Studi Pengembangan Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FSPI) pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2024, penulis mengikuti kegiatan turun lapangan yang berlokasi di Perpustakaan Kelurahan Daerah Pesawahan untuk memenuhi tugas mata kuliah. Selanjutnya pada awal bulan januari tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Waykalam Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Dan pada bulan maret tahun 2025, penulis mengikuti program Magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus merdeka) selama 6 bulan.

## MOTTO

عَلَّمُونَ دَلِيلًا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ لَكُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْئًا تُحِبُّونَ أَنْ وَعَسَى ۖ لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئًا تَكْرَهُونَ أَنْ وَعَسَى

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(*Q.S. Al-Baqarah : 216*)

“Semua jatuh bangunku hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)

“Pendidikanku berdiri di atas kaki rapuh Ayahku dan kuatnya doa Ibuku, jadi akan ku bantu menyelesaikan semua ini demi mereka tujuanku”

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Telah Memberikan Kemudahan Untuk Segala Urusan Serta Memberikan Rahmat Dan Ridho-Nya Sehingga Penulis Dapat Mempersembahkan Tulisan Ini Sebagai Tanda Terimakasih Dan Kasih Sayang Kepada :

### **Kedua Orang Tua**

Bapak Supriyatno M.Pd. dan Ibu Sismawati S,Pd. yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sehingga penulis memiliki semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan berkah kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk membahagiakan kedua orang tua penulis;

Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala Nikmat dan Rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Implementasi Program Bantuan Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki. Data yang tercantum dalam skripsi ini masih perlu digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan penulis kekuatan, kesehatan dan ilmu pengetahuan serta memberikan penulis kemudahan yang pada akhirnya karya sederhana ini dapat selesai dengan tepat waktu;
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi;
6. Bapak Junaidi, S.Pd., M. Sos., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.

7. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, dan pengarahan selama penyusunan skripsi;
8. Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H., selaku Dosen Pembahas yang sudah memberikan masukan dan sarannya terhadap skripsi;
9. Bapak Drs. Suwarno, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesediaannya memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan selama di masa perkuliahan ini;
10. Bapak/Ibu dosen serta staff pada jurusan sosiologi yang telah memberikan ilmu selama penulis berkuliah di jurusan sosiologi;
11. Bapak Drs. M. Zuriadi., M.H., sebagai kepala dinas yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk berkesempatan melaksanakan penelitian ini;
12. Bapak/Ibu Operator di Dinas Sosial dan Desa Sukadadi yang telah membantu penulis memberikan informasi mengenai masyarakat yang menerima bantuan serta memberikan data yang penulis butuhkan;
13. Masyarakat KPM Sembako di Desa Sukadadi yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
14. Teristimewa, kepada Bapak Supriyatno dan Ibu Sismawati tercinta , yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati memberikan doa serta dukungan dalam setiap langkah penulis. Berkat cinta dan pengorbanan ini, penulis akhirnya bisa sampai dititik ini dan selalu menjadi penuntun dalam perjalanan hidup penulis.
15. Kepada adik penulis yang selalu memberikan dukungan serta motivasi agar penulis segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan menjadi bagian indah dari cerita hidup penulis;
16. Kepada sahabat tercinta, Rani Lutfia yang sudah berkontribusi besar dalam mendukung dan memotivasi penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, serta menjadi cerita indah dari hidup penulis. Terimakasih juga kepada sahabat penulis, Hikmah, Intan, Ika, dan Amel yang

telah memberikan dukungan, motivasi dan menjadi teman terbaik dalam hidup penulis;

17. Kepada sahabat seperjuangan, Felia, Resti dan Yumna yang telah kebersamai dan mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian begitu berarti dan menjadi bagian dari cerita indah perjalanan penulis dibangku perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.
18. Kepada teman-teman KKN, Bagus, Anya, Risa, Dwi, Ilham dan Anta yang telah memberikan motivasi belajar, menorehkan cerita indah dan pengalaman baru selama 40 hari masa KKN.
19. Untuk teman-teman Sosiologi 2022 yang telah memberikan kenangan, dukungan, kebersamaan dan ilmu selama berproses di masa perkuliahan;
20. Pihak-pihak lain yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu penulis selama menyelesaikan skripsi dan masa studi yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu
21. Jurusan tercinta, Sosiologi FISIP Universitas Lampung.
22. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang keraguan, namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam, serta menjadi bukti bahwa perjuangan dalam penyusunan skripsi ini patut dibanggakan.

Bandarlampung, 12 Mei 2026

Penulis,

Aisyah Putri Nur Istiqomah

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan tentang Implementasi Program Bantuan Sembako .....	10
2.1.1 Tinjauan tentang Implementasi .....	10
2.1.2 Tinjauan tentang Program Bantuan Sembako .....	11
2.1.3 Tujuan Program Bantuan Sembako.....	12
2.1.4 Kriteria Penerima Bantuan Sembako .....	12
2.1.5 Mekanisme Penyaluran Bantuan Sembako .....	13
2.1.6 Tahap Implementasi Program Bantuan Sembako .....	15
2.1.7 Pihak yang terlibat dalam Implementasi Program .....	20
2.1.8 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Sembako .....	22
2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Sembako .....	23
2.2.1 Faktor Pendukung .....	23
2.2.2 Faktor Penghambat.....	24
2.2.3 Implementasi Program Bantuan Sembako dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai bagian dari Evaluasi....	26
2.3 Tinjauan tentang Kemiskinan.....	26
2.3.1 Pengertian Miskin .....	26
2.3.2 Pengertian Rentan Miskin .....	27
2.3.3 Kriteria Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin .....	27
2.3.3 Perbedaan Miskin dan Rentan Miskin .....	29
2.4 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial.....	29
2.4.1 Definisi dan Fungsi Kesejahteraan Sosial .....	29
2.4.2 Faktor Kesejahteraan dalam Keluarga .....	31
2.4.3 Indikator Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN .....	32

2.4.2 Model Kesejahteraan Sosial .....	35
2.5 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons .....	36
2.6 Kajian Penelitian Terdahulu .....	39
2.8 Kerangka Berpikir .....	43
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2. Fokus Penelitian .....	45
3.3 Lokasi Penelitian .....	46
3.4 Informan Penelitian .....	46
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.6.1. Observasi .....	48
3.6.2. Wawancara .....	48
3.6.3 Dokumentasi.....	48
3.7 Teknik Analisis Data .....	49
3.7.1 Reduksi Data .....	49
3.7.2 Penyajian Data.....	49
3.7.3 Kesimpulan.....	50
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	50
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Sejarah singkat Desa Sukadadi.....	51
4.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah .....	52
4.3 Data Kependudukan .....	52
4.3.1 Jenis Kelamin .....	53
4.3.2 Dusun .....	54
4.3.3 Usia.....	55
4.3.4 Agama .....	56
4.4 Pemerintahan .....	57
4.5 Pendidikan .....	58
4.5.1 Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah .....	58
4.6 Kondisi Ekonomi Masyarakat .....	59
4.6.1 Mata Pencaharian Pokok.....	60
4.6.2 Tenaga Kerja .....	61
4.7 Sosial dan Kesejahteraan.....	62
4.7.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	62
4.7.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	64
4.7.3 Sarana dan Prasarana Umum.....	65
4.7.4 Sarana dan Prasarana Ibadah .....	66
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Profil Informan .....	67
5.2 Hasil Penelitian.....	70
5.2.1 Implementasi Program Bantuan Sembako .....	70
5.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Sembako.....	81
<b>5.3 Pembahasan .....</b>	<b>84</b>

5.3.1 Implementasi Program Bantuan Sembako Melalui Teori AGIL ...	84
5.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Sembako Berdasarkan Teori AGIL .....	86
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>90</b>
<b>6.1 Kesimpulan .....</b>	<b>90</b>
<b>6.2 Saran.....</b>	<b>91</b>
6.2.1 Saran Untuk Pemerintah Desa Sukadadi.....	91
6.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan 2025 .....	3
2. Data Desa Sukadadi Tahun 2025 .....	4
3. Perbandingan Jumlah KPM Terdaftar dan Realisasi KPM Berhasil Tersalur .	5
4. Klasifikasi kebutuhan dasar keluarga ( <i>basic needs</i> ) .....	33
5. Klasifikasi Kebutuhan Psikologis ( <i>psychological needs</i> ) .....	33
6. Klasifikasi Kebutuhan Pengembangan ( <i>develomental needs</i> ) .....	34
7. Klasifikasi Kebutuhan Aktualisasi Diri ( <i>self esteem</i> ) .....	35
8. Data Informan Penelitian .....	47
9. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Sukadadi tahun 2025 .....	52
10. Data Penduduk berdasarkan Usia tahun 2025.....	55
11. Data Penduduk berdasarkan Agama tahun 2023-2025 .....	56
12. Jumlah Aparatur Desa berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2023-2025.....	57
13. Tingkat Pendidikan masyarakat tahun 2025 .....	58
14. Data Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan tahun 2025 .....	60
15. Data Penduduk Tenaga Kerja berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin tahun 2025.....	61
16. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2024-2025.....	62
17. Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan menurut Jenisnya tahun 2023-2025.....	64
18. Jumlah Sarana dan Prasarana Umum menurut Jenisnya tahun 2025 .....	65
19. Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah menurut Jenisnya tahun 2025 .....	66
20. Profil Informan.....	67
21. Tujuan Program.....	70
22. Kriteria Penerima Bantuan .....	72
23. Mekanisme Penyaluran .....	74
24. Tahapan Implementasi .....	75
25. Pihak yang Terlibat dalam Implementasi Program .....	76
26. Dasar Hukum Pelaksanaan Program .....	77
27. Pemanfaatan Dana Bantuan .....	78
28. Faktor Pendukung .....	81
29. Faktor Penghambat.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) .....	17
Gambar 2. Registrasi dan Distribusi .....	18
Gambar 3. Pelaksanaan Registrasi dan Distribusi KKS .....	18
Gambar 4. Alur Edukasi dan Sosialisasi.....	19
Gambar 5. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	44
Gambar 6. Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2023-2025.....	53
Gambar 7. Data Penduduk Berdasarkan Dusun tahun 2025.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara .....	97
2. Daftar Informan Penelitian.....	98
3. Dokumentasi .....	99
4. Surat Izin Penelitian .....	101

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan utama di masyarakat. Kondisi ini dipandang sebagai situasi yang tidak diharapkan karena dapat memicu berbagai permasalahan, seperti gangguan kesehatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya pengangguran, hingga munculnya masalah sosial lainnya (Istyawan, 2025). Menurut Basyari, kemiskinan bukan hanya soal keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi penghambat dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (Reika et al., 2024). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47% dari total populasi.

Secara umum, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu miskin dan rentan miskin. Miskin merupakan kondisi ketika individu tidak memiliki penghasilan maupun aset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Seseorang dikategorikan miskin apabila pendapatan perkapitanya berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan yang terbatas, produktivitas kerja yang rendah, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan gizi, sehingga menciptakan siklus ketidakberdayaan yang sulit untuk diputus. Sedangkan Rentan Miskin adalah kondisi seseorang yang memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan namun tetap memiliki resiko tinggi jatuh ke bawah garis kemiskinan dan seringkali memiliki keterbatasan akses dalam memenuhi kebutuhan dasar karena penghasilan yang didapat tidak menentu.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menanggulangi masalah kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Upaya pemerintah dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai dengan melaksanakan hukum-hukum yang objektif dan merata agar masyarakat mendapatkan keadilan dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. (Sanjaya et al., 2022). Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal terkait ayat (1) dan (2), program bantuan sosial merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang menjadi wujud nyata tanggung jawab pemerintah, termasuk aparat daerah, dalam memperhatikan dan membantu masyarakat yang miskin dan rentan miskin. (Humaidi, 2021).

Salah satu program yang diberikan pemerintah dalam membantu menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia adalah Program Bantuan Sembako. Program Bantuan Sembako merupakan transformasi dari program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan pembaruan nilai bantuan dan jenis komoditas pangan. Transformasi ini dilakukan untuk menerapkan prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. (Apriyani, 2024). Kebijakan pemberian bantuan sosial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang mengatur berbagai aspek terkait kesejahteraan sosial di Indonesia, termasuk tujuan, prinsip, penyelenggaraan dan kelembagaannya. Tujuan Penyaluran Sembako ini sesuai dengan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 pada pasal 2 yang bertujuan untuk meringankan pengeluaran bulanan KPM dengan membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan, serta mendukung keberlangsungan hidup masyarakat miskin dan rentan miskin dengan memberikan jenis bahan makanan yang mengandung gizi seimbang kepada KPM untuk mencegah terjadinya stunting dan gizi buruk di Indonesia. (Nurkhaini et al., 2023).

Implementasi Program Bantuan Sembako dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Kementerian Sosial yang ditargetkan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

menggunakan KKS (Kartu keluarga Sejahtera) yang terdata pada sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Masyarakat (DTSEN). DTSEN adalah basis data tunggal yang terintegrasi berisikan informasi rujukan awal mengenai kondisi sosial ekonomi dan demografi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan yang menerima bantuan. DTSEN digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah masyarakat berhak untuk menerima program bantuan sosial dari pemerintah atau tidak.

Penyaluran bantuan sembako dilakukan oleh Pos Penyalur/Bank Penyalur yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten dibawah pengawasan dari Kementrian Sosial. Mekanisme penyaluran sembako disalurkan secara nontunai melalui KKS (Kartu keluarga Sejahtera) untuk membeli bahan pokok di E-warong. (Nurhayati, 2022). E-warong adalah agen resmi yang bekerja sama dengan Bank Penyalur (Himbara) untuk menyalurkan bantuan sembako. Namun dalam kondisi tertentu, penyaluran bantuan sembako pada wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur nontunai, sinyal komunikasi dan akses geografis yang sulit dijangkau, penyaluran bantuan dilakukan oleh petugas penyalur yang memberikan bantuan tunai secara langsung kepada penerima manfaat, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa hadir dilokasi penyaluran dengan mekanisme standar.

Desa Sukadadi merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Pesawaran yang menjadi lokasi dalam implementasi Program Sembako dan menjadi wilayah penerima bantuan sembako karena banyaknya masyarakat yang terdata sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin di kecamatan Gedong Tataan.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan 2025

No	Desa/Wilayah	Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Tahun 2024	Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Tahun 2025
1	Bernung	333	262

No	Desa/Wilayah	Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Tahun 2024	Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Tahun 2025
2	Bogorejo	319	299
3	Gedong Tataan	450	448
4	Karang Anyar	307	393
5	Kurungan Nyawa	144	125
6	Negeri Sakti	209	205
7	Padang Ratu	175	162
8	Sukadadi	733	762
9	Waylayap	335	371
10	Wiyono	525	580

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran (2025)*

Dapat disimpulkan pada (tabel 1) bahwa Desa Sukadadi merupakan desa dengan angka penduduk miskin dan rentan miskin yang cukup tinggi di kecamatan gedong tataan. Implementasi program bantuan sembako di Desa Sukadadi ini mengacu pada DTSEN yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dan menjadi penghubung antara pemerintah desa ke masyarakat penerima bantuan. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat di desa ini didominasi oleh petani, buruh, dan pekerja sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu dan relatif rendah. (Data desa Sukadadi, 2025). Kondisi ini menjadikan sebagian warganya termasuk dalam kategori keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana yang tercatat pada DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Masyarakat) tahun 2025.

**Tabel 2.** Data Desa Sukadadi Tahun 2025

Tahun	Indikator	Total
2025	Jumlah Penduduk (Desa) Keseluruhan	5.526
2025	Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin (Desa)	762
2025	Jumlah KPM Penerima bantuan sembako berdasarkan DTSEN	731

*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

Implementasi Program Sembako di Desa Sukadadi merupakan bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang oleh pemerintah agar tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam regulasi dan pedoman pelaksanaannya. Secara umum, implementasi program bantuan sembako di Kabupaten Pesawaran, terutama di desa Sukadadi telah berjalan sesuai prosedur dan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaannya, program ini masih sering mengalami berbagai macam kendala, terutama pada aspek data penerima dan perubahan mekanisme penyaluran. Selain itu, masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sembako, memiliki slip gaji dan masih dikatakan mampu terkadang masih mendapatkan bantuan, sehingga terjadi ketidaktepatan sasaran program. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sembako di Desa Sukadadi belum sepenuhnya efektif.

**Tabel 3.** Perbandingan Jumlah KPM Terdaftar dan Realisasi KPM Berhasil Tersalur

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah KPM Terdaftar</b>	<b>Berhasil Tersalur</b>	<b>Selisih</b>	<b>Kendala Teknis</b>
<b>2022</b>	511	492	19	Data bank dan data sensus penduduk berubah/tidak sama
<b>2023</b>	516	506	5	Penerima bantuan tidak ada ditempat/tidak menggesek KKS
<b>2024</b>	581	420	161	Validasi data KPM bermasalah
<b>2025</b>	731	547	184	Perubahan sistem dan mekanisme penyaluran

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran (2025)*

Berdasarkan (tabel 2), selisih pada jumlah KPM terdaftar dengan yang berhasil tersalur merupakan permasalahan polemik dalam pelaksanaan program ini. Fenomena ini memperlihatkan adanya gap permasalahan apa yang seharusnya terjadi dengan realita yang sedang terjadi dilapangan. Idealnya, seluruh KPM Sembako yang terdaftar dalam DTSEN seharusnya dapat menerima bantuan sosial sesuai ketentuan. Namun pada kenyataannya, tidak semua yang terdata di DTSEN memperoleh haknya, hal ini menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya optimal dan terdapat ketidaksesuaian penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dalam implementasi

program dengan meningkatkan akurasi pendataan dan distribusi bantuan agar implementasi program sembako di Desa Sukadadi mengalami perbaikan dari sisi ketepatan penyaluran bantuan dan distribusi.

Penelitian ini penting dilakukan agar program bantuan sembako yang menjadi instrumen pengentasan kemiskinan benar-benar berjalan sesuai tujuan. Tanpa adanya kajian atau evaluasi, program ini berisiko terus mengalami ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi, serta pemborosan anggaran negara. Penelitian ini tidak hanya berperan sebagai kontribusi akademik, tetapi juga sebagai masukan nyata bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial dari hasil wawancara penerima bantuan sembako. Temuan dari penelitian ini bisa digunakan untuk memperbaiki pendataan penerima, distribusi bantuan, dan transparansi kebijakan sosial, serta memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan teknis dan sosial dalam melaksanakan program bantuan sosial di Desa Sukadadi.

Pemilihan lokasi ini didukung oleh rekomendasi dan kesesuaian data dari Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran yang memungkinkan peneliti memiliki akses terhadap data, narasumber, serta memahami kondisi lapangan secara lebih mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program sembako di tingkat desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supiani dan Setiawati (2020), dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada E-Warong di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong berfokus pada evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menitikberatkan pada pengukuran tingkat keberhasilan program melalui indikator manfaat, akurasi, dan kelayakan. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada proses implementasi Program Bantuan Sembako, serta lebih mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program.

Penelitian oleh Hatimatul Husna dkk (2021) dengan judul Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, terletak pada fokus kajian dan konteks wilayah penelitian. Penelitian Halimatul Husna ini menitikberatkan pada implementasi program sembako serta faktor pendorong dan penghambatnya di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada implementasi program bantuan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah perdesaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deybi Debora Palit (2022) yang berjudul Implementasi Program Bantuan Dana Dan Sembako bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan, berfokus pada implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program bantuan sosial serta berbagai kendala yang muncul selama masa pandemi dan menitikberatkan pada penanganan dampak krisis sosial ekonomi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi program bantuan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga tidak hanya melihat proses pelaksanaan program, tetapi juga dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat dan berfokus pada keberlanjutan program bantuan sembako sebagai bentuk intervensi sosial pemerintah.

Dengan melihat fenomena yang terjadi, maka diperlukan adanya identifikasi lebih dalam mengenai implementasi program bantuan sembako di Desa Sukadadi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, serta kendala yang sering terjadi di Desa Sukadadi. Selain itu, penelitian dengan judul implementasi sudah banyak dilakukan ditingkat kabupaten atau kecamatan, namun belum ada penelitian spesifik di Desa Sukadadi yang menjelaskan bagaimana implementasi program bantuan sosial sembako ini berjalan, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **‘Implementasi Program Bantuan Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran’**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Sembako yang berjalan di Desa Sukadadi?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Program Bantuan Sembako kepada masyarakat Miskin dan Rentan Miskin di Desa Sukadadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian pada penelitian ini, yakni :

1. Mengetahui implementasi program sembako yang berjalan di Desa Sukadadi
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Sembako kepada masyarakat Miskin dan Rentan Miskin di Desa Sukadadi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pengetahuan pada bidang sosiologi kesejahteraan sosial, yang menelaah bagaimana implementasi program bantuan sembako sebagai bentuk kebijakan kesejahteraan sosial pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Secara Praksis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program bantuan sembako, antara lain;
  - a. Bagi Pemerintah Desa dan Dinas Sosial  
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki pelaksanaan program bantuan sembako agar lebih efektif dan tepat

sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat (KPM)

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam menerima bantuan sembako, serta mendorong partisipasi aktif.

masyarakat dalam mengevaluasi penyaluran bantuan agar lebih transparan dan tepat sasaran.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian mengenai program bantuan sosial atau kebijakan publik yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan tentang Implementasi Program Bantuan Sembako

#### 2.1.1 Tinjauan tentang Implementasi

Menurut Wahab, S. A. (1997), Implementasi merupakan segala tindakan yang dilakukan, baik individu maupun kelompok di dalam pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. (Suparti, 2023). Implementasi adalah bentuk penyelenggaraan atau pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, yaitu (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki dan telah disepakati bersama.

Implementasi Program Bantuan Sembako di Desa Sukadadi ini dianalisis menggunakan teori Struktural Fungsional (AGIL), yaitu pada aspek *Adaptation* (Adaptasi), sistem atau struktur sosial menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat dengan melakukan pembaruan data penerima bantuan dan penyesuaian mekanisme distribusi kebutuhan masyarakat. Pada aspek *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), program bantuan sembako mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan untuk memenuhi gizi seimbang dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat Miskin dan Rentan Miskin di Desa Sukadadi. Pada aspek *Integration* (Integrasi), lembaga sosial dan aktor pelaksana melakukan koordinasi yang intensif untuk membentuk hubungan yang erat sehingga implementasi bantuan dapat berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaannya

dan mengurangi konflik sosial antar masyarakat dan pihak pelaksana. Pada aspek *Latency* (Pemeliharaan Pola), pembentukan pola kemandirian dan motivasi dilakukan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui program-program pemberdayaan desa dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan saja, tetapi juga meningkatkan motivasi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan dasar.

### **2.1.2 Tinjauan tentang Program Bantuan Sembako**

Program Sembako merupakan sebuah program transformasi dari Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan pengembangan dari program ini, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas bahan pangan yang tidak hanya berupa telur dan beras seperti pada program BPNT. Untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan Keluarga Penerima Manfaat yang kini disebut dengan KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat dari program bantuan sembako, dimana masyarakat dengan kategori ini adalah keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaannya.

KPM yang sudah terdata pada DTSEN akan termasuk didalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan akan ditetapkan secara mutlak oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementrian Sosial. Besaran dana bantuan program sembako yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga meningkat, yang semula Rp.110.000/KPM/bulan, dengan adanya pengembangan program sembako kini naik menjadi Rp.200.000/KPM/bulan. Pemberian bantuan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali atau yang disebut dengan Triwulan. Penyaluran bantuan ini diberikan kepada KPM dengan mengambil uang tunai untuk dibelikan bahan pangan dan harus sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2021 pasal 24 ayat (1) yang harus memenuhi prinsip gizi seimbang, diantaranya memiliki kandungan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. (Rizqiawan et al., 2022).

Kandungan karbohidrat yang harus dipenuhi oleh KPM seperti, sagu, kentang, jagung, singkong, ataupun bahan lain yang sesuai dengan kearifan lokal. Kandungan protein hewani seperti daging, telur, ikan dan kandungan lain yang sesuai dengan kearifan lokal. Kandungan protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, ataupun bahan lain yang sesuai dengan kearifan lokal. Adapun kandungan vitamin dan mineral seperti sayuran dan buah-buahan. Bahan pangan yang diutamakan berasal dari produksi daerah setempat.

### **2.1.3 Tujuan Program Bantuan Sembako**

Berdasarkan Permensos No. 4 tahun 2023, tujuan program ditetapkan sebagai berikut;

1. Membantu meringankan pengeluaran bulanan KPM sekaligus memperkuat ketahanan pangan mereka sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial, upaya pengentasan kemiskinan, serta penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemenuhan kebutuhan pangan seperti beras, telur, dan buah-buahan. (Istyawan et al., 2025)
2. Mendorong penerapan prinsip 6T dalam penyaluran bantuan sosial sembako, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tertib administrasi.
3. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan melalui penggunaan transaksi non-tunai sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya bagi usaha-usaha kecil yang bergerak di sektor perdagangan.

### **2.1.4 Kriteria Penerima Bantuan Sembako**

Agar dapat menerima bantuan dari program sembako, masyarakat harus memenuhi beberapa komponen (Rizqiawan et al., 2022) sebagai berikut;

1. Penerima bantuan harus berasal dari keluarga yang tergolong Miskin atau Rentan Miskin yang memiliki kondisi perekonomian terendah di daerah pelaksanaannya.

2. Penerima bantuan sembako harus terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Masyarakat (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Penerima bantuan harus memastikan namanya tercatat dalam data DTSEN.
3. Bukan pegawai aktif atau pensiunan yang mendapatkan gaji setara atau lebih dari (UMR) Upah Minimum Regional. (Sifa et al., 2023)

### **2.1.5 Mekanisme Penyaluran Bantuan Sembako**

Dalam penyaluran bantuan sembako, terdapat beberapa mekanisme berdasarkan (Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2024) yaitu;

1. Kementerian Sosial menetapkan jumlah target alokasi KPM secara nasional setiap tahun untuk diberikan bantuan sembako.
2. Jumlah KPM disetiap daerah/kota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Program Sembako berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau terdaftar di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation).
3. Melakukan musyawarah di Kelurahan dan Desa (Musdes) yang dipimpin oleh Kades/Lurah untuk membuat penetapan usulan atau penghapusan usulan bantuan sembako yang akan disampaikan ke Kementerian Sosial
4. Penetapan jumlah KPM dilakukan secara nasional oleh Kementerian Sosial dan Direktur Penanganan Fakir Miskin yang sudah dimusyawarahkan dengan perangkat desa akan ditetapkan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota melalui sistem informasi kesejahteraan sosial yang kemudian akan ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi
5. Daftar calon KPM yang sudah ditetapkan akan diperiksa dan dilengkapi variabelnya yang memuat;
  - a. Nomor calon pemegang KKS atau pengurus KPM
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang KKS/pengurus KPM yang telah sesuai dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

- c. Nomor Kartu Keluarga (KK) yang telah sesuai dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
  - d. Tempat lahir pemegang KKS/pengurus KPM
  - e. Tanggal lahir pemegang KKS/pengurus KPM
  - f. Nama ibu kandung (khususnya nama anak perempuan dari ibu kandung) pemegang KKS/pengurus KPM
  - g. Nama kepala keluarga dari KPM
  - h. Nama anggota keluarga lainnya dalam KPM.
  - i. Alamat tempat tinggal pemegang KPM sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - j. Kode wilayah yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan sesuai dengan KTP pemegang KPM dalam program bantuan sembako
6. Data yang telah ditetapkan kemudian akan melalui tahap verifikasi dan validasi dalam DTSEN oleh petugas pendata atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang bertugas sebagai operator di tingkat desa.
  7. Dinas sosial di masing-masing kabupaten/kota selanjutnya melakukan tahap akhir berupa penetapan daftar calon KPM dan melaporkannya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk Bantuan Sosial Sembako, kemudian laporan ini akan disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dibagian bidang pengelolaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Masyarakat (DTSEN). Finalisasi data ini akan disetorkan kepada direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan program bantuan sembako.
  8. Direktorat Jenderal yang menangani penyaluran bantuan sembako ini kemudian akan menetapkan data KPM yang berupa nama, alamat, dan identitas pendukung lainnya berdasarkan data yang sudah disampaikan oleh satuan kerja yang bekerja dibidang DTSEN dan akan diberikan datanya ke PT Pos Penyalur/Bank Penyalur.
  9. PT Pos Penyalur/Bank Penyalur akan melakukan pembersihan data dan mapping data KPM untuk tingkat desa hingga tingkat kecamatan. Data

yang tidak lengkap akan dilengkapi dan diberikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)/Bulog untuk bantuan nontunai, dan Dinas Sosial untuk bantuan tunai agar dipersiapkan pengadaan dan penerimaan bantuan sosial

10. Direktorat Jenderal yang menangani penyaluran bantuan sembako ini kemudian akan menetapkan data KPM yang berupa nama, alamat, dan identitas pendukung lainnya berdasarkan data yang sudah disampaikan oleh satuan kerja yang bekerja dibidang DTSEN dan akan diberikan datanya ke PT Pos Penyalur/Bank Penyalur. Setelah pengadaan siap, PT Pos Penyalur/Bank Penyalur akan melakukan pengiriman dan distribusi sesuai alokasi bantuan sosial sembako yang akan diterima oleh KPM.

### **2.1.6 Tahap Implementasi Program Bantuan Sembako**

Implementasi Program Bantuan Sembako dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan agar bantuan pangan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Tahapan tersebut yaitu;

#### **1. Persiapan**

Pada tahap awal, pelaksana program melakukan koordinasi untuk memastikan kejelasan dasar hukum, mekanisme penyaluran, serta tahapan pelaksanaan program bantuan sembako. Koordinasi ini dimulai dari tingkat pemerintah pusat antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan BPS/Badan Pangan Nasional Pusat melalui forum tim koordinasi bantuan sosial pangan pusat, dan dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. (Agustina I, Bangsu T., 2025). Selanjutnya, koordinasi dilakukan di tingkat provinsi melalui forum tim koordinasi bantuan sosial pangan kabupaten/kota yang membahas seluruh proses pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah, mulai dari dukungan pendaftaran melalui APBD, penyesuaian dan penetapan pagu anggaran, pengelolaan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, hingga dukungan lain yang dibutuhkan. Tahap koordinasi terakhir dilakukan secara berjenjang antara pemerintah kabupaten/kota dengan kecamatan serta

desa/kelurahan melalui forum yang sama untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan dengan baik.

Selanjutnya, penetapan data dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG pada menu BSP (Bantuan Sosial Pangan), di mana data tersebut telah ditandai sebagai KPM sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp200.000 per KPM selama tiga bulan untuk setiap kabupaten/kota. Pihak pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data akan melakukan pengecekan secara berkala guna menyesuaikan data dengan kondisi sosial terbaru. Perubahan data dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, khususnya untuk menonaktifkan KPM yang sudah tidak memenuhi kriteria, seperti meninggal dunia, pindah tempat tinggal, tidak lagi berada di lokasi penyaluran, memiliki keanggotaan ganda, bekerja di perusahaan, menolak bantuan, atau sudah tergolong mampu secara ekonomi (Suparti, 2023).

## 2. Pembukaan Rekening KPM

Pembukaan rekening bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan secara kolektif oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Rekening ini digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan. Bank penyalur di tingkat pusat yang menerima data KPM kemudian menyampaikan laporan hasil pembukaan rekening kolektif (burekol) kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali dengan menggunakan format baku antarbank yang telah ditentukan, serta dilengkapi kode wilayah dari satuan kerja pengelola data di tingkat kecamatan.

Setelah daftar KPM ditetapkan, Kementerian Sosial akan menyampaikan laporan hasil pembukaan rekening tersebut kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan di tingkat kabupaten/kota. Bagi KPM yang telah berhasil dibuatkan rekening, bank penyalur pusat akan mencetak Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) dan mendistribusikannya kepada bank penyalur di daerah.

Adapun instrumen pembayaran yang digunakan untuk menyalurkan dana bantuan sembako kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan desain seperti yang ditunjukkan berikut ini.



**Gambar 1.** Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Untuk program Sembako, kartu KKS berfungsi sebagai alat transaksi yang menyimpan nilai/besaran manfaat dari program Sembako sehingga pada saat pemanfaatan dana bantuan, KKS wajib dibawa oleh KPM.

- a. Pada KKS tercantum nama pengurus KPM, nomor KKS, nama bank penyalur, serta nomor telepon yang dapat dihubungi untuk pengaduan.
- b. KKS dari bank penyalur dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) yang terdiri dari 6 digit angka dan digunakan untuk mengakses rekening saat melakukan transaksi.
- c. KKS beserta PIN hanya boleh dipegang dan disimpan oleh KPM, dan tidak diperkenankan berada di tangan pihak lain.

### 3. Registrasi dan Distribusi

Registrasi merupakan kegiatan pencatatan atau verifikasi identitas penduduk yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 17, proses registrasi dalam program Sembako dilakukan untuk memastikan kecocokan antara data identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan data yang tercantum pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran KKS dilakukan melalui kantor kepala desa masing-masing agar KPM lebih mudah melakukan registrasi dengan membawa dokumen yang diperlukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Desa, serta dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan identitas asli yang bersangkutan. Pada saat

penyaluran KKS berlangsung, petugas dari Bank Penyalur akan mencocokkan data yang tertera pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa oleh KPM. Setelah kegiatan registrasi dan distribusi KKS dilaksanakan, bank penyalur akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengenai jumlah data KPM yang menerima KKS.



**Gambar 2.** Registrasi dan Distribusi



**Gambar 3.** Pelaksanaan Registrasi dan Distribusi KKS

#### 4. Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi serta memberikan pemahaman mengenai program yang akan dijalankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut. (Husna H. & Ariyani E, Azwari, 2021). Setelah Bank Penyalur melakukan pembukaan rekening secara kolektif, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan pendamping sosial memberikan edukasi dan sosialisasi secara bertahap kepada KPM mengenai kebijakan dan pelaksanaan program melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 20 mengenai edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada KPM tentang tujuan program serta mekanisme penggunaan dana bantuan agar KPM dapat memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan, mengetahui mekanisme pembelian dana bantuan, larangan penyalahgunaan dana

bantuan, serta tata cara pengaduan jika KPM menemukan kendala dalam pemanfaatan dana bantuan sembako.



**Gambar 4.** Alur Edukasi dan Sosialisasi

#### 5. Penyaluran Dana Bantuan Sembako

Proses penyaluran dana dalam program bantuan sembako dilakukan oleh bank penyalur tanpa dipungut biaya apa pun. Penyaluran ini dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di bank penyalur ke rekening bantuan pangan atau sub-akun uang elektronik milik KPM. Proses tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di bank penyalur. Penyaluran dilakukan setiap bulan dan paling lambat pada tanggal 10, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

#### 6. Pemanfaatan Dana Bantuan Sembako

Proses penggunaan dana dalam program bantuan sembako dilakukan dengan membeli bahan pangan menggunakan KKS. KPM memiliki kebebasan untuk menentukan jenis bahan pangan yang ingin dibeli tanpa dibatasi harus berbelanja di e-warung tertentu. Dana bantuan yang diterima melalui KKS digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, dan KPM bebas memilih warung atau supermarket dengan harga dan kualitas yang lebih baik tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, apabila ditemukan harga yang tidak wajar, KPM dapat menyampaikan keluhan kepada perangkat desa atau kelurahan, Tenaga Pelaksana bantuan sosial pangan, maupun melalui saluran pengaduan lainnya.

## 7. Evaluasi dan Pelaporan

Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan program, yang meliputi pemantauan realisasi penyaluran, kepatuhan KPM dalam menggunakan bantuan sesuai ketentuan, serta identifikasi kendala di lapangan. Kesimpulan dari hasil evaluasi dan laporan ini akan menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk menyempurnakan mekanisme penyaluran di periode berikutnya.

### **2.1.7 Pihak yang terlibat dalam Implementasi Program**

#### 1. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI)

Kementerian Sosial bertugas sebagai penyelenggara utama program di tingkat nasional dengan menetapkan kebijakan, regulasi, dan pedoman pelaksanaan, menentukan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menyalurkan dana bantuan ke bank penyalur yang telah bekerja sama.

#### 2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial Kabupaten berfungsi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program di tingkat daerah, melakukan verifikasi dan validasi data KPM, mengawasi kinerja Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), serta menjadi penghubung antara pemerintah pusat, bank penyalur, dan masyarakat penerima bantuan.

#### 3. Bank Penyalur

Bank Penyalur sesuai dengan fungsinya yaitu menerima dana secara non tunai dari Kementerian sosial, seperti BRI, Mandiri, BNI, atau BTN untuk disalurkan melalui rekening KPM yang diakses dengan KKS, meliputi pembukaan rekening tabungan atau KKS, serta menyediakan cabang/agen transaksi di kecamatan/kelurahan tempat pelaksanaan program sembako. Bank Penyalur menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat penerima bantuan program dengan memastikan dana bantuan sosial agar sampai ke tangan yang berhak menerima bantuan.

#### 4. Pos Penyalur

Pos Penyalur dalam konteks ini merujuk pada peran lembaga jasa pengiriman dan logistik, seperti PT Pos Indonesia yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. Pada Program Bantuan Sembako, PT Pos Indonesia memiliki fungsi utama sebagai perantara dalam pendistribusian dana dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak. Pendistribusian melalui pos penyalur ini dilakukan secara tunai dan diserahkan langsung kepada KPM di kantor pos, balai desa, atau lokasi distribusi tertentu. Selain penyaluran bantuan, PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan keuangan seperti wesel pos, giro, dan cek pos, yang dapat digunakan oleh Masyarakat. PT Pos Indonesia dipilih karena memiliki jaringan dan jangkauan yang luas hingga mencapai daerah terpencil dan dianggap lebih efisien dan efektif dalam pendistribusian sembako.

#### 5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Pendamping kesejahteraan sosial/TKSK ini dalam pelaksanaan program sembako memiliki fungsi dengan memberikan pendampingan dan edukasi kepada KPM ditingkat kecamatan terkait dengan penggunaan bantuan, memfasilitasi registrasi dan aktivasi rekening, mengawasi pelaksanaan distribusi sembako dan memastikan bantuan tepat sasaran, serta menampung aspirasi dan keluhan KPM untuk dilaporkan ke Dinas Sosial. TKSK bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial.

#### 6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah karena kondisi ekonomi dan sosialnya. KPM menerima bantuan sembako sesuai ketentuan, menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan memberikan umpan balik terkait pelayanan dan kualitas bantuan.

### **2.1.8 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Sembako**

Dasar hukum pelaksanaan Program Sembako berasal dari berbagai regulasi yang menjadi landasan formal, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri terkait. (Agustina I, Bangsu T., 2025)

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang mengatur berbagai aspek terkait kesejahteraan sosial, termasuk tujuan, prinsip, dan kelembagaan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengatur mekanisme identifikasi, pendataan, dan penyaluran bantuan sosial bagi fakir miskin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Bantuan Sosial, yang menjelaskan tentang bentuk bantuan, kriteria penerima, dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara akuntabel dan transparan untuk memenuhi prinsip 6T.
5. Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Gizi Seimbang yang harus dipenuhi masyarakat dalam pembelian bahan pangan
6. Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang mengatur teknis penyaluran Program Bantuan Sembako
7. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penentuan penerima bantuan sembako berdasarkan data yang valid.
8. Permensos Nomor 5 Tahun 2021 pasal 16 tentang tahapan penyaluran dana program sembako
9. Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang tujuan penyaluran program sembako
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Program Sembako, yang menetapkan nilai bantuan, kriteria komoditas pangan, dan tata cara penyaluran bantuan setiap tahun.

## **2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Sembako**

### **2.2.1 Faktor Pendukung**

1. Adanya penambahan tugas dan fungsi dalam penyaluran program sembako

Suatu organisasi akan dibentuk apabila memiliki visi dan tujuan yang sama dalam mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi tim koordinasi bantuan sosial pangan di daerah kabupaten/kota telah dirincikan secara singkat dan jelas sehingga tim koordinasi sudah memahami perihal tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan penyaluran program sembako yang secara keseluruhan dibantu oleh tim koordinasi bantuan sosial pangan di kecamatan.

2. Ketepatan Besaran Dana KPM Sembako

Untuk menjalankan sebuah kebijakan, maka dibutuhkan anggaran dan dana agar kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber pendanaan Program Sembako ditanggung oleh APBN yang sudah disalurkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikirimkan melalui bank penyalur atau pos penyalur langsung ke rekening KPM. Besar anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk KPM Sembako yaitu Rp.200.000/KPM setiap 3 bulan.

Pada tahun pertengahan 2016, pemerintah meluncurkan program e-Warong yang merupakan singkatan dari Elektronik Gotong Royong. Program ini ditujukan untuk mengalihkan program bantuan sosial tunai menjadi bantuan sosial nontunai berbasis digital. Namun mekanisme menggunakan e-Warong ini tidak lagi digunakan pada tahun 2021 karena dinilai kurang efektif dalam penyaluran program sembako. Mekanisme penyaluran program bantuan sembako pada tahun 2021 dilakukan secara non tunai berupa bahan pangan yang senilai dengan jumlah dana yang diterima oleh KPM.

Waktu penyaluran program sembako dilaksanakan sesuai dengan ketetapan jadwal dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI nomor 29 yang berisikan tentang petunjuk teknis percepatan dalam penyaluran program sembako yang dilakukan setiap 3 bulan. Oleh karena itu, proses penyaluran bantuan uang tunai pada tahun 2022 dilakukan dengan mekanisme yang disesuaikan oleh kantor pos/bank penyalur tanpa menunggu pencairan dari e-warong. Pada tahun 2023, penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib mengambil langsung bantuan sosial tanpa bisa diwakilkan. Bantuan ini bisa langsung diambil oleh masyarakat melalui kantor pos, bank mandiri, atau melalui BRI Link sesuai dengan permensos RI Nomor 4 Tahun 2023 terkait pelaksanaan program sembako.

### 3. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi dalam Penyaluran Program Sembako

Dalam penyaluran program sembako, diperlukan adanya infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai seperti aplikasi mobile banking, BRI Link untuk pencairan program bantuan, karena setiap wilayah kabupaten/kota memiliki kondisi infrastruktur non tunai dan akses yang memadai. (Sifa L.N., Prasetya S., 2023)

#### **2.2.2 Faktor Penghambat**

##### 1. Kurangnya Sosialisasi bagi Pelaksana Program Sembako

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang pokok dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui program sembako dengan melakukan berbagai tupoksi yang sesuai dengan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup KPM. Namun dalam pengimplementasiannya, pendistribusian program sembako seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana karena pelaksana program sembako yang kurang memiliki kesadaran kolektif dalam pendistribusian program sembako.

## 2. Validitas data yang tidak akurat

Data yang kurang akurat atau tidak terbaru sering kali menyebabkan program sembako yang disalurkan tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, pembaruan data KPM Program sembako harus dipantau secara rutin melalui Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) karena data dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan data kemiskinan yang berkurang atau bertambah pada sebuah desa. Operator yang mendapat mandat dalam mengelola dan memperbarui data kemiskinan ditunjuk oleh Kementerian Sosial hanya terdapat pada setiap desa atau kelurahan setempat dan pada Dinas Sosial. Masyarakat KPM yang memiliki masalah pada data, seperti perbedaan NIK dalam kartu keluarga harus melapor pada perangkat desa setempat untuk melakukan pembaruan data agar KPM sembako tetap menerima bantuan sosial. Selain itu, orang yang terdaftar di KPM dan sudah meninggal namun masih terdata di DTSEN sebagai penerima bantuan juga dapat menghambat pendistribusian program sembako ke masyarakat.

## 3. Keterlambatan Informasi dan Kurangnya Koordinasi Penyaluran Program Bantuan Sembako antara Pusat dan Daerah

Program Sembako adalah program bantuan dibawah naungan dan pengawasan langsung oleh Kementerian Sosial yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Bank Penyalur seperti Himbara, atau Pos Penyalur. Sementara itu, pengawasan pelaksanaan ditingkat daerah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memantau keberhasilan program. Bantuan sosial dari pusat memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi dibawahnya agar penyaluran dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Namun, jika koordinasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya, maka pelaksana program akan berjalan tanpa arah dan mengambil keputusan sendiri, sehingga bantuan program sembako tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Selain itu, keterlambatan informasi yang diterima oleh pihak Desa juga menjadi faktor yang menghambat tercapainya tujuan program. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan mekanisme penyaluran dan input data di aplikasi SIKS-NG. (Alfarishi, 2021).

### **2.2.3 Implementasi Program Bantuan Sembako dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai bagian dari Evaluasi**

Implementasi kesejahteraan sosial di Indonesia meliputi berbagai program dan layanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Beberapa program ini dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari implementasi kesejahteraan sosial adalah Program Bantuan Sembako, dimana program ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki keluarga miskin dan rentan miskin, terutama pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Dalam implementasi program ini, diperlukan adanya evaluasi agar program ini dapat berjalan sesuai kebutuhan, terutama dalam aspek ketepatan sasaran, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta partisipasi aktif dari kelembagaan desa. Implementasi program di desa Sukadadi ini belum optimal dikarenakan beberapa faktor seperti ketidaktepatan penerima bantuan, ketidaksesuaian data masyarakat penerima bantuan, serta keterbatasan koordinasi antara pihak pusat dan daerah yang seringkali menjadi permasalahan dalam implementasi program. Untuk itu, implementasi program sosial kedepannya harus difokuskan pada evaluasi dan dampak nyata terhadap perubahan sosial ekonomi penerima, seperti peningkatan pendapatan dan kecukupan memenuhi kebutuhan dasar.

## **2.3 Tinjauan tentang Kemiskinan**

### **2.3.1 Pengertian Miskin**

Miskin atau disebut juga sebagai kemiskinan absolut (*Absolute Poverty*) merupakan kondisi ketika seseorang tidak memiliki aset atau penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan juga kesehatan minimum (Wijayanti et al., 2025). Penduduk

miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, yang merupakan batas minimum pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan sosial. Seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila ditandai dengan keterbatasan akses dalam memperoleh berbagai layanan, rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kondisi kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidup secara keseluruhan, yang mencerminkan adanya lingkaran ketidakberdayaan. (Mansur, 2024).

### **2.3.2 Pengertian Rentan Miskin**

Rentan Miskin adalah kondisi masyarakat yang memiliki penghasilan diatas garis kemiskinan, namun memiliki resiko tinggi jatuh kebawah garis kemiskinan dan seringkali mengalami keterbatasan akses pemenuhan kebutuhan dasar. Rentan Miskin umumnya memiliki pekerjaan di sektor informal, seperti buruh harian, pengrajin industri rumah tangga, pedagang keliling ataupun pekerjaan lain yang penghasilan hariannya tidak tetap. (Lestari & Robiani, 2023)

### **2.3.3 Kriteria Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin**

#### **A. Masyarakat Miskin**

Berdasarkan standar dari Badan Pusat Statistik, kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin antara lain;

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, dan kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, ataupun tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar yang layak, atau bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin.

#### B. Masyarakat Rentan Miskin

Berdasarkan metodologi dari Badan Pusat Statistik, klasifikasi dan kriteria kelompok rentan miskin meliputi beberapa indikator utama, yaitu;

1. Garis Kemiskinan Nasional ditetapkan sekitar Rp.600.000/kapita/bulan, sedangkan kelompok rentan miskin memiliki pengeluaran sekitar Rp.600.000 hingga Rp.900.000/ orang setiap bulannya.
2. Sebagian besar pendapatannya didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi makanan
3. Umumnya bekerja di sektor informal, pertanian, dan pekerjaan serabutan yang tidak menjamin penghasilan tetap harian maupun bulanan
4. Sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah, yakni tamat SD/tidak tamat SD
5. Seringkali belum memiliki tabungan darurat yang memadai, jaminan kesehatan yang komprehensif, dan jaring pengaman sosial
6. Masyarakat kategori rentan miskin memiliki resiko jatuh dalam kelompok miskin ketika terjadi kenaikan harga barang pokok/inflasi dan terjadinya

guncangan finansial pribadi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), atau ada anggota keluarga yang jatuh sakit.

### **2.3.3 Perbedaan Miskin dan Rentan Miskin**

Miskin dan Rentan miskin merupakan sebuah definisi yang sama namun berbeda. Pemahaman yang jelas mengenai konsep miskin dan rentan miskin menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan sosial, termasuk dalam implementasi program bantuan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Dalam hal ini, perbedaan miskin dan rentan miskin dapat disimpulkan dari beberapa definisi yang sudah dijabarkan, bahwa miskin merupakan individu/masyarakat yang tidak mempunyai akses pangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal. Sedangkan rentan miskin merupakan individu/masyarakat yang hidup berkecukupan, namun masih memiliki resiko untuk jatuh miskin. Umumnya, rentan miskin ini memiliki pekerjaan dengan upah minimum dan tidak tetap sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok, seperti beras dan air mineral.

## **2.4 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial**

### **2.4.1 Definisi dan Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Rahmansyah et al., 2020). Individu dikatakan sejahtera apabila dalam keadaan yang aman, selamat, dan tentram. (Prayogi, 2024). Kesejahteraan menjadi tujuan dan alat ukur kesuksesan sebuah pemerintahan dalam menjalankan negaranya. Setiap sistem kesejahteraan memiliki penekanan yang berbeda pada tiap alasannya. Di satu sistem lebih menekankan pada pengurangan angka kemiskinan, sedangkan disisi lainnya lebih menekankan pada upaya promosi integrasi sosial di masyarakat. (Siti Alifa Fentiani et al., 2025). Kesejahteraan sosial memiliki beberapa fungsi yakni;

1. Fungsi pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah sosial. Upaya preventive ditekankan pada kegiatan untuk menciptakan pola dan hubungan yang baru di masyarakat dengan menekankan fokus pada antisipasi, edukasi dan pencegahan diri guna mengurangi potensi kerugian.

2. Fungsi penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi dalam membantu kekurangan fisik, emosional dan sosial agar masyarakat yang memiliki masalah dapat beraktivitas kembali tanpa syarat di masyarakat. Fungsi ini juga mencakup fungsi pemulihan (rehabilitasi), untuk memulihkan, memperbaiki, dan mengembalikan kemampuan individu atau keluarga yang mengalami permasalahan sosial agar dapat kembali berperan secara optimal di masyarakat. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pemulihan mental, sosial, dan ekonomi penerima manfaat.

3. Fungsi pengembangan (*Development*)

Fungsi pengembangan dalam konteks kesejahteraan sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, potensi, dan kualitas hidup individu maupun kelompok agar mampu menjalankan peran sosialnya secara optimal. Fungsi ini menekankan pada aspek peningkatan (*upgrading*) kemampuan dan pemulihan, sehingga sasaran tidak hanya terbebas dari masalah sosial, tetapi juga mengalami kemajuan secara berkelanjutan dalam proses pemberdayaan infrastruktur, dan aset sumber daya yang ada di masyarakat.

4. Fungsi Pendukung (*Supportive*)

Fungsi ini meliputi kegiatan-kegiatan penunjang yang mampu mendukung tercapainya tujuan sektor dan bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi ini juga digunakan untuk mengurangi beban dan tekanan sosial yang terjadi akibat perubahan sosial ekonomi, menghindari terjadinya

konflik sosial dimasyarakat akibat pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

#### **2.4.2 Faktor Kesejahteraan dalam Keluarga**

Pada hakikatnya, kesejahteraan sosial dibentuk melalui keluarga yang juga sejahtera. (Sari et al., 2023). Terbentuknya kesejahteraan ini tercermin melalui pengembangan kualitas keluarga yang menyeluruh di masyarakat. Pembentukan kesejahteraan dalam keluarga diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga secara menyeluruh, termasuk oleh masyarakat dan keluarga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu;

##### **1. Faktor Intern Keluarga**

###### **a. Jumlah Anggota Keluarga**

Tuntutan keluarga di era ini semakin meningkat, yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok saja, tetapi pada kebutuhan lainnya seperti kebutuhan jajan anak, hiburan, rekreasi, sarana ibadah, dan sarana transportasi. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi apabila jumlah anggota dalam keluarga kecil.

###### **b. Tempat Tinggal**

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan dalam keluarga. Jika kondisi tempat tinggal diatur sedemikian rupa, maka akan menimbulkan suasana yang damai dan nyaman. Namun, apabila tempat tinggal tidak teratur, tidak jarang akan menimbulkan kebosanan untuk menempatnya, termasuk juga ketegangan jika tempat tinggal yang ditempati tidak memberikan rasa nyaman dan tenang.

###### **c. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga**

Keadaan sosial dan ekonomi keluarga dikatakan baik dan harmonis apabila hubungan yang terjalin antar anggota keluarga didasari oleh ketulusan hati dan rasa kasih sayang, sehingga ada rasa saling menghormati, toleransi, saling membantu, dan saling percaya.

#### d. Keadaan Ekonomi Keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Adapun sumber pendapatan yang diperoleh, yaitu dari hasil menyewakan tanah/ pekerjaan lain diluar berdagang, seperti membantu dirumah orang (menyetrika, mencuci baju, upahan kebun), dan sebagainya. Semakin banyak sumber keuangan/pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup dalam keluarga.

#### 2. Faktor Ekstern

Kesejahteraan dalam keluarga perlu dipelihara dan dikembangkan untuk menghindari ketegangan antar anggota keluarga yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan di keluarga. Faktor yang dapat menimbulkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin yang datang dari luar anggota keluarga, berupa;

- a. Faktor manusia, yaitu iri hati, fitnah, ancaman fisik dan pelanggaran norma dalam masyarakat.
- b. Faktor alam, yaitu bahaya yang disebabkan oleh kerusakan alam dan manusia, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran, serta penularan virus penyakit.
- c. Faktor ekonomi negara, dimana pendapatan tiap masyarakat atau income perkapita rendah sehingga terjadi inflasi.

#### **2.4.3 Indikator Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN**

Tingkat Kesejahteraan Keluarga menurut BKKBN (Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dikelompokkan menjadi 5 tahap, yaitu;

##### 1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (PKS)

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*)

## 2. Tahapan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator keluarga sejahtera I (*basic needs*), tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologi (*psychological needs*).

**Tabel 4.** Klasifikasi kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*)

No.	Indikator
1.	Umumnya makan 2 kali sehari menurut kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food)
2	Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian
3	Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang layak, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.
4	Jika ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, dan Bidan untuk diberikan obat-obatan yang telah mendapat izin peredaran dari instansi terkait seperti Departemen kesehatan dan Badan POM.
5	Bila pasangan subur ingin KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi/tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, dan bidan yang memberikan pelayanan KB dengan kontrasepsi modern, berupa IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil bagi pasangan usia subur yang membutuhkan. (hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).
6	Semua anak dikeluarga usia 7-15 tahun mengikuti wajib belajar 9 tahun, terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat atau setingkat SLTP/ sederajat.

## 3. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator Keluarga Sejahtera (*basic needs*), dan 8 indikator Keluarga Sejahtera II (*psychological needs*), tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III atau kebutuhan pengembangan (*develomental needs*).

**Tabel 5.** Klasifikasi Kebutuhan Psikologis (*psychological needs*)

No.	Indikator
1.	Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, baik dilakukan

	sendiri maupun bersama-sama oleh keluarga dirumah, atau ditempat yang ditentukan oleh kepercayaan/ajaran agama masing-masing.
2	Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging, ikan atau telur sebagai lauk untuk melengkapi keperluan gizi protein. Namun indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.
3	Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru yang layak pakai (baru/bekas) dalam setahun.
4	Luas lantai rumah paling kurang 8 m <sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah, terhitung dari keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas dan tingkat bawah termasuk pada bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang.
5	Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, tidak harus dirawat dirumah sakit dan tidak terpaksa absen bekerja/sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
6	Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus menerus.
7	Seluruh anggota usia 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin dan memahami arti dari kalimat tersebut.
8	Pasangan usia subur yang memiliki 2 anak atau lebih menggunakan obat/alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP, dan MOW.

#### 4. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator Keluarga Sejahtera (*basic needs*), 8 indikator Keluarga Sejahtera II (*psychological needs*), dan 5 indikator Keluarga Sejahtera III atau Kebutuhan Pengembangan (*develomental needs*) dari keluarga, tetapi tidak memenuhi salah satu dari indikator Keluarga Sejahtera III Plus atau indikator aktualisasi diri.

**Tabel 6.** Klasifikasi Kebutuhan Pengembangan (*develomental needs*)

No	Indikator
1	Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama yang dianut, seperti mendengarkan pengajian, mendatangkan guru ngaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama islam dan sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama kristen.
2	Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang ataupun barang, misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang

	perhiasan, maupun rumah sewaan. Tabungan berupa barang apabila dirupiahkan minimal senilai Rp.500.00-
3	Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi yang membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu antar seluruh anggota keluarga.
4	Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, maupun olahraga.
5	Keluarga memperoleh informasi secara lokal, nasional, regional, maupun internasional melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin), dan media elektronik (seperti radio, televisi, dan internet)

#### 5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan indikator dari Keluarga Sejahtera I (*basic needs*), Keluarga Sejahtera II (*psychological needs*), Keluarga Sejahtera III dan 2 indikator aktualisasi diri (*self esteem*) keluarga, yaitu;

**Tabel 7.** Klasifikasi Kebutuhan Aktualisasi Diri (*self esteem*)

No	Indikator
1	Keluarga secara teratur memberikan sumbangan materil dengan sukarela baik dalam bentuk uang maupun barang untuk kegiatan sosial dan kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan di itngkat RT/RW/Dusun.
2	Ada anggota yang berperan aktif sebagai pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus yayasam, organisasi adat, kesenian, olahraga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW. serta LKMD/LMD

#### 2.4.2 Model Kesejahteraan Sosial

Titmuss mengembangkan ide tentang 3 model kesejahteraan sosial yaitu,

##### 1. Model Kesejahteraan Residual

Model Kesejahteraan Residual adalah salah satu pendekatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memandang bantuan sosial sebagai upaya terakhir (*last resort*) yang diberikan hanya ketika mekanisme dukungan utama seperti keluarga, pasar, dan komunitas gagal berfungsi. Dalam model ini, negara tidak menjadi penyedia utama kesejahteraan, melainkan hanya berperan ketika sumber dukungan lain

tidak mampu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi. Intervensi ini digunakan pada negara dengan kebijakan kesejahteraan yang minimalis, dimana bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada kelompok yang sangat miskin. Secara konseptual, model ini memiliki beberapa ciri pokok:

- a. Bersifat sementara, bantuan hanya diberikan hingga individu/keluarga
- b. mampu kembali mandiri.
- c. Bersifat selektif, hanya ditujukan kepada kelompok yang benar-benar
- d. membutuhkan dan memenuhi kriteria tertentu.
- e. Bersifat minimalis, tingkat bantuan dibatasi pada pemenuhan kebutuhan
- f. dasar, bukan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

### *2. Industrial Achievement Performance Model*

Model ini berlandaskan pada prinsip bahwa manfaat sosial diperoleh melalui kerja keras serta kontribusi individu dalam dunia kerja. Kesejahteraan sosial dipandang sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian ekonomi seseorang, yang umumnya diberikan melalui program asuransi sosial seperti pensiun, tunjangan pengangguran, atau asuransi kesehatan.

### *3. Institutional Redistributive Model*

Pandangan progresif Titmuss tercermin dalam model ini dengan menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak universal bagi seluruh warga negara, tidak hanya bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan sosial serta mengakui bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisinya, berhak memperoleh layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

## **2.5 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons**

Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan tersusun dari berbagai struktur

(lembaga, peran, aturan, dan program) yang masing-masing memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial. Teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial merupakan sebuah hubungan antar sistem dengan bagian-bagian yang saling ketergantungan. Jika suatu sistem atau struktur sosial mengalami perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pada sistem yang lain. Penelitian mengenai implementasi program bantuan sembako dapat dianalisis melalui teori ini karena program tersebut merupakan bagian dari struktur sosial yang dirancang untuk menjalankan fungsi kesejahteraan.

Pada teori struktural fungsional ini, Talcott Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri dari beberapa aktor individu, dimana aktor individu tersebut akan melakukan interaksi dengan individu lain secara terstruktur dalam suatu instansi atau lembaga. Dalam teori struktural fungsional, ada empat konsep yang harus dimiliki dalam suatu sistem atau struktur dengan singkatan AGIL, yaitu *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).

#### 1. Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi adalah kemampuan suatu sistem atau struktur sosial untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Konteks ini merujuk pada sistem sosial yang menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat, serta kemampuan pemerintah desa Sukadadi yang merespons perubahan kondisi ekonomi masyarakat, seperti kenaikan harga bahan pokok atau perubahan tingkat kemiskinan. Jika program sembako tidak adaptif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kebutuhan akan bersifat formalitas dan tidak mampu meningkatkan kebutuhan masyarakat secara nyata.

#### 2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

*Goal Attainment* berkaitan dengan kemampuan sistem dalam menetapkan tujuan dan memastikan tujuan tersebut tercapai secara efektif. Pemerintah harus menetapkan tujuan yang jelas dalam implementasi program bantuan

sosial, seperti pemenuhan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin, ketepatan sasaran masyarakat yang menerima bantuan, apakah sesuai dengan yang tercatat di DTSEN atau tidak, serta evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

### 3. Integrasi (*Integration*)

Integrasi adalah suatu sistem atau struktur sosial yang memiliki kemampuan untuk mengatur hubungan antar komponen dan tiga fungsi yang saling berhubungan, yaitu: perubahan, pencapaian tujuan, dan keterlambatan. Dalam konteks bantuan sosial, integrasi ini melibatkan koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, seperti kementerian Sosial, Dinas Sosial, pemerintah daerah yang terdiri dari RT/RW, kelurahan atau pendamping kesejahteraan, serta partisipasi masyarakat setempat. Tanpa integrasi yang baik, program bantuan menjadi tidak efisien atau bahkan gagal mencapai sasarannya.

### 4. Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Suatu sistem atau struktur sosial harus mampu mempertahankan, memperbaiki, dan melengkapi motivasi individu dan tatanan kebudayaan yang dikenal sebagai pemeliharaan pola. Dalam konteks ini, implementasi bantuan sembako tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan konsumsi jangka pendek, tetapi juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Jika bantuan sosial diberikan tanpa diimbangi dengan nilai kemandirian dan pemberdayaan, maka akan menimbulkan ketergantungan sosial yang dapat menghambat kesejahteraan jangka panjang. Masyarakat yang sudah bergantung pada bantuan sosial akan terus menerus berharap pada bantuan tersebut tanpa berusaha keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, implementasi program bantuan sosial harus didukung dengan nilai solidaritas sosial, semangat gotong royong, dan upaya pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat akan lebih termotivasi untuk meningkatkan taraf secara mandiri.

Empat konsep tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat. Teori struktural fungsional ini memfokuskan pada struktur masyarakat yang saling mendukung untuk mencapai keseimbangan yang dinamis. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial pada sistem dan struktur sosial dimasyarakat yang saling berkaitan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar masyarakat dan pihak pelaksana.

## 2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa referensi jurnal dan skripsi dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dan landasan agar dapat mengkaji suatu permasalahan yang ingin diteliti. Selain penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dikaji. Adapun rincian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sebagai berikut;

**Tabel 8.** Penelitian Terdahulu

<b>Jenis Publikasi</b>	<b>Jurnal</b>
<b>Nama Peneliti</b>	Hatimatul Husna <sup>1</sup> , Erma Ariyani, Trisyilvana Azwari (2021)
<b>Judul Penelitian</b>	Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara
<b>Hasil Penelitian</b>	Gap penelitian pada jurnal ini membahas tentang Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara yang dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan program dengan 5 tahap yang dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. Namun dalam implementasinya, terdapat ketidaksesuaian jumlah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan jumlah realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan. Dalam pengimplementasian ini juga terdapat penyalahgunaan dalam memanfaatkan bantuan yang dilakukan oleh salah satu KPM yang tidak mempergunakan bantuan dengan sebagaimana mestinya.

<b>Perbedaan Penelitian</b>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatimatul Husna dkk (2021) terletak pada fokus kajian dan konteks wilayah penelitian. Penelitian Hatimatul Husna ini menitikberatkan pada implementasi program sembako serta faktor pendorong dan penghambatnya di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada implementasi program bantuan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah perdesaan.
<b>Jenis Publikasi</b>	<b>Jurnal</b>
<b>Nama Peneliti</b>	Deybi Debora Palit, Femmy M.G, Tulusan Novie Palar (2022)
<b>Judul Penelitian</b>	Implementasi Program Bantuan Dana Dan Sembako bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan
<b>Hasil Penelitian</b>	Dalam jurnal ini, implementasi program bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid-19 di desa kaasar kecamatan kauditan sudah sangat baik. Pemberian bantuan seperti bantuan langsung tunai dana-desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial non tunai, program harapan dan bantuan sembako yang diberikan oleh pemerintah sudah sangat membantu masyarakat desa kaasar yang terkena dampak covid-19. Namun masih banyak juga kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan ini seperti masyarakat yang tidak memenuhi kriteria, mendapat bantuan sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, bantuan juga terkadang terlambat pendistribusiannya sehingga sulit mencapai target yang ditentukan.
<b>Perbedaan Penelitian</b>	Penelitian yang dilakukan oleh Deybi Debora Palit (2022) berfokus pada implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program bantuan sosial serta berbagai kendala yang muncul selama masa pandemi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi program bantuan sembako dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga tidak hanya melihat proses pelaksanaan program, tetapi juga dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Selain itu, dari segi konteks penelitian, penelitian terdahulu dilaksanakan dalam situasi darurat pandemi Covid-19 yang menitikberatkan pada penanganan dampak krisis sosial ekonomi, sedangkan penelitian ini dilakukan dalam kondisi sosial masyarakat secara umum dengan

	fokus pada keberlanjutan program bantuan sembako sebagai bentuk intervensi sosial pemerintah.
<b>Jenis Publikasi</b>	<b>Jurnal</b>
<b>Nama Peneliti</b>	Supiani, Budi Setiawati, Lilis Suryani (2020)
<b>Judul Penelitian</b>	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada E-Warong di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong
<b>Hasil Penelitian</b>	Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada e-warong di Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, pelaksanaannya dapat dikategorikan baik. Manfaat BPNT melalui e-warong terlihat dari kemudahan KPM dalam menjangkau lokasi e-warong. Akses yang mudah ini membantu KPM memperoleh bahan pangan dengan lebih praktis. Informasi tersebut juga telah disampaikan kepada KPM saat kegiatan sosialisasi program BPNT. Kemudahan akses terhadap e-warong membuat manfaat BPNT lebih terasa, sehingga tujuan program yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan kualitas gizi, serta memastikan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan dapat tercapai dengan lebih optimal.
<b>Perbedaan Penelitian</b>	Penelitian yang dilakukan oleh Supiani dan Setiawati (2020) berfokus pada evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menitikberatkan pada pengukuran tingkat keberhasilan program melalui indikator manfaat, akurasi, dan kelayakan. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada proses implementasi Program Bantuan Sembako serta pengalaman subjektif, bagaimana program ini dimaknai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan.
<b>Jenis Publikasi</b>	<b>Skripsi</b>
<b>Nama Peneliti</b>	Siti Ulfah Alfarishi (2021)
<b>Judul Penelitian</b>	Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang
<b>Hasil Penelitian</b>	Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi yang terjadi dalam penyelenggaraan program bantuan sembako menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dilaksanakan oleh dinas sosial untuk mengukur sejauh mana implementasi program ini dan apa saja faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program sembako dengan menggunakan KKS. Dalam pelaksanaan program sembako menggunakan KKS ini, dari besarnya

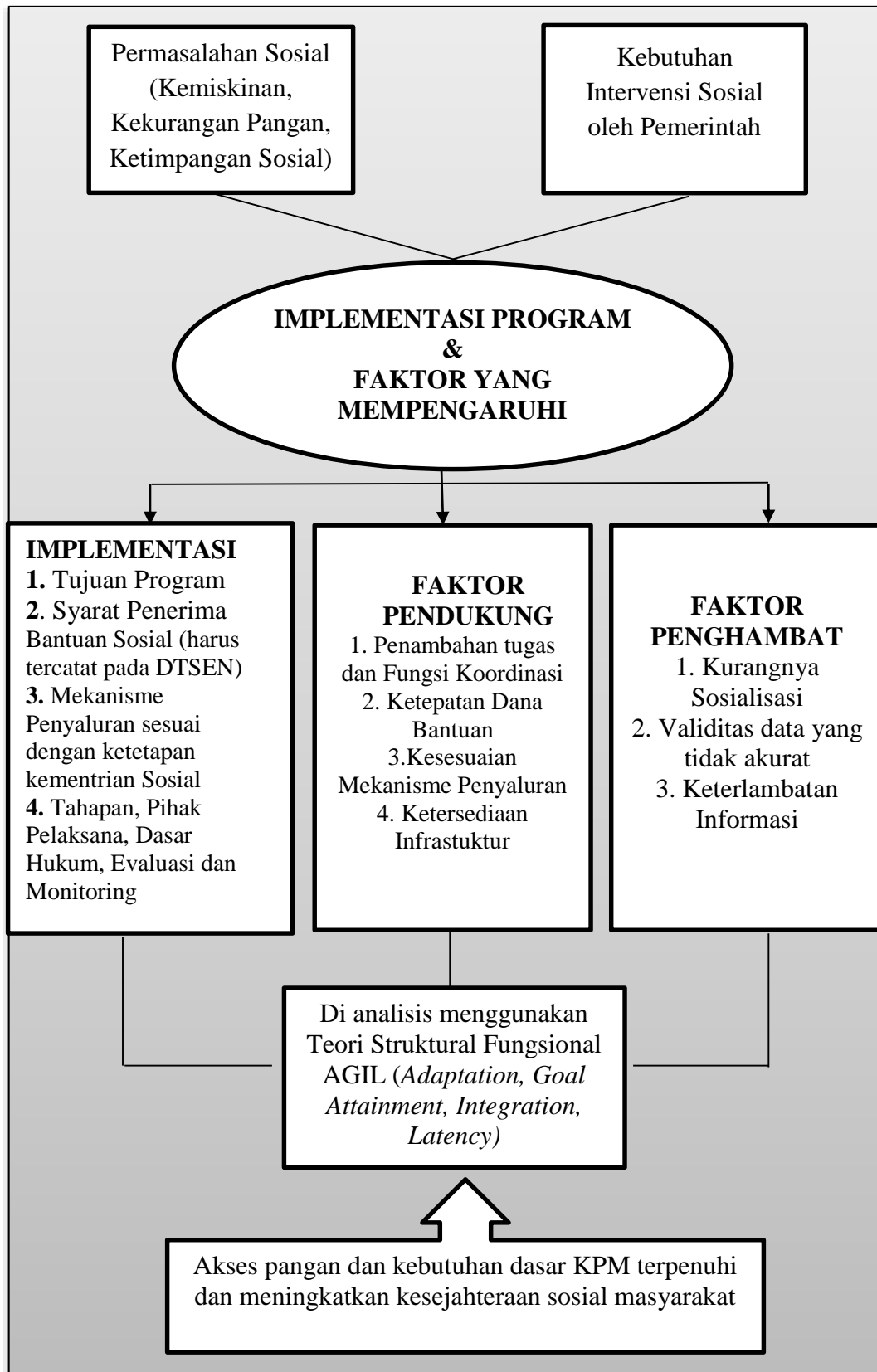
	nominal yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam satu program bantuan sosial masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bantuan sosial ini sebagaimana mestinya. Masih banyak pula masyarakat yang ekonominya tergolong baik, tetapi masih saja menggunakan kartu KKS padahal masih banyak masyarakat yang layak tidak mendapatkan bantuan tersebut. Keterbatasan waktu pemberian Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat yang biasanya diberikan sebulan sekali, tetapi dalam satu bulan Keluarga Penerima Manfaat belum mendapatkan Sembako juga menjadi kendala dalam implementasi program ini.
<b>Perbedaan Penelitian</b>	Penelitian yang dilakukan oleh Alfarishi (2021) mengkaji implementasi kebijakan Program Sembako pada tingkat kabupaten dengan fokus pada proses pelaksanaan program oleh pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini menelaah implementasi bantuan sembako pada tingkat desa dengan pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.
<b>Jenis Publikasi</b>	<b>Skripsi</b>
<b>Nama Peneliti</b>	Pitri Ani (2023)
<b>Judul Penelitian</b>	Implementasi Program Sembako di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
<b>Hasil Penelitian</b>	Implementasi program bantuan sembako di desa situgal sudah sangat baik jika dilihat dari beberapa aspek, ditinjau dari pengimplementasian program sembako melalui kelompok sasaran seperti masyarakat miskin dan kelompok rentan (orangtua dan lansia) sudah cukup tepat sasaran. Hanya saja, dinas sosial atau lembaga yang berwenang mengatur data KPM sebaiknya perlu memperbaharui data sesering mungkin dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau keberhasilan seluruh program.
<b>Perbedaan Penelitian</b>	Penelitian yang dilakukan oleh Pitri Ani (2023) berfokus pada implementasi Program Sembako dengan menekankan aspek administratif kebijakan, seperti ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program. Penelitian tersebut lebih menempatkan program sembako sebagai kebijakan publik yang dievaluasi dari sisi pelaksanaan teknis dan kinerja aparatur pelaksana. Sementara itu, penelitian yang sedang diteliti ini memiliki fokus yang berbeda,

	yaitu mengkaji implementasi Program Bantuan Sembako yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
--	--

## 2.8 Kerangka Berpikir

Implementasi Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang diangkat pada penelitian ini menunjukkan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih memiliki beberapa permasalahan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, kekurangan pangan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi (campur tangan) dan tindakan secara langsung untuk mencapai kesejahteraan sosial dan membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan implementasi program bantuan sosial, seperti program bantuan sosial sembako. Dalam implementasi program ini, pemerintah menetapkan tujuan, kriteria penerima bantuan, mekanisme penyaluran, tahapan, serta evaluasi dan monitoring.

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program berupa faktor pendukung pada fungsi koordinasi, ketepatan dana bantuan, kesesuaian mekanisme penyaluran, serta ketersediaan Infrastruktur pendukung. Sedangkan faktor penghambat pada implementasi ini dilihat dari kurangnya sosialisasi, validitas data yang tidak akurat, dan keterlambatan informasi yang dianalisis menggunakan teori pendekatan Struktural Fungsional AGIL, *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi/Koordinasi), dan *Latency* (Pemeliharaan Pola Kemandirian). Dengan demikian, melalui kesatuan sistem pada implementasi program yang didukung oleh analisis AGIL, maka diharapkan KPM dapat mengalami perubahan kondisi ke arah yang lebih baik agar KPM mendapatkan akses pangan dan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.



**Gambar 5.** Kerangka Pemikiran Penelitian

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam tentang suatu fenomena, situasi dan peristiwa sosial yang ada di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang di alami. (Murdiyanto, 2020).

Pada pendekatan kualitatif, penyajian data berupa wawancara, dokumen resmi/pribadi dan catatan lapangan saat melakukan observasi dan turun lapangan. Kemudian, digunakan metode deskriptif untuk menjelaskan tentang bagaimana implementasi Program Bantuan Sembako ini berjalan di Desa Sukadadi, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh dalam implementasi program sosial ini di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Kajian penelitian ini difokuskan pada implementasi dan pengaplikasian Program Bantuan Sembako yang berjalan di Desa Sukadadi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program. Aspek yang dikaji pada penelitian ini berkaitan Implementasi yang menetapkan tujuan, kriteria penerima, mekanisme penyaluran, tahapan, pihak pelaksana, dasar hukum, serta evaluasi dan monitoring. Adapun faktor yang dikaji dalam penelitian ini berupa faktor pendukung yang meliputi fungsi

koordinasi, ketepatan dana dan ketersediaan infrastruktur pendukung, sedangkan faktor penghambat dalam implementasi ini meliputi kurangnya sosialisasi, validitas data yang tidak akurat, serta keterlambatan informasi kepada penerima bantuan.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih lengkap, jelas dan akurat yang memungkinkan peneliti mudah untuk melakukan penelitian dan observasi. Dalam hal ini, lokasi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Pertimbangan lokasi ini sesuai dengan pra-riset yang peneliti lakukan sebelumnya bahwa angka KPM penerima bantuan Sembako memiliki jumlah terbanyak (609 KPM Sembako pada tahun 2025) dibandingkan desa lainnya

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan memiliki peran penting dalam metode penelitian kualitatif karena menjadi sumber utama dalam pengumpulan data terkait dengan peristiwa yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini, yakni teknik purposive sampling. Menurut (Cohen, 2007), purposive sampling adalah teknik pemilihan informan yang dilakukan tidak secara acak, namun sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. (Susiloadi, 2023). Dalam penelitian ini, dilakukan pemilihan kriteria untuk mempermudah peneliti dalam menentukan informan, yang memiliki kriteria sebagai berikut;

1. Terlibat langsung dalam pelaksanaan program bantuan sembako
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang program bantuan sembako
3. Informan Penerima Manfaat di Desa Sukadadi

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi dalam penelitian, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel 8.** Data Informan Penelitian

No	Peran
1	Kepala Dinas Sosial
2	Operator Dinas Sosial
3	Operator Desa Sukadadi
4	Kasi Kesejahteraan Desa Sukadadi
5	Kepala Desa Sukadadi
6	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sembako

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah kata-kata dan penjelasan dari informan di Desa Sukadadi melalui wawancara yang meliputi berbagai informasi berkaitan dengan implementasi Program Bantuan Sembako di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Teknik yang digunakan pada penelitian ini antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sementara data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, artikel, dan jurnal. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa jumlah data masyarakat Desa Sukadadi yang tercatat dalam DTSEN, monografi desa, jumlah data penerima Bantuan Sembako di Desa Sukadadi, serta dokumentasi sebagai dokumen pendukung dalam penelitian ini.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mengkaji dan mengumpulkan data, dimana cara tersebut merujuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dan dilihat oleh kasat mata, tetapi dapat dipraktikkan penggunaannya dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, meliputi;

### **3.6.1. Observasi**

Menurut (Hardani, 2020:124), observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung. (Ariyanti, 2022). Observasi terbagi menjadi tiga yaitu observasi partisipatif, observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek yang sedang diteliti. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang terletak di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada masyarakat KPM yang menerima Bantuan Sembako.

### **3.6.2. Wawancara**

Wawancara merupakan interaksi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang sudah ditetapkan untuk memperoleh informasi penting tentang suatu objek yang diteliti. Pada teknik wawancara ini, peneliti menyusun pertanyaan yang akan disampaikan agar pembicaraan lebih terarah dan fokus sehingga responden bebas menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang akan diteliti, peneliti melakukan wawancara langsung di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dan Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, transkrip, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto, dokumen tertulis, atau alat elektronik yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang baik menjadi fondasi bagi akuntabilitas organisasi, karena mencatat seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan program.

Tanpa dokumentasi yang memadai, maka setiap pergantian pengurus berisiko mengulang dari awal karena tidak memiliki pijakan administratif dan historis yang jelas. (Aras, 2025)

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (Hardani:2020) dapat dilakukan melalui 3 tahap, yakni:

#### **3.7.1 Reduksi Data**

Reduksi data adalah tahap pertama dalam analisis data kualitatif karena ada banyak data yang diperoleh dari survei lapangan. Reduksi data melibatkan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema utama untuk menyederhanakan data yang menjadi fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian digabungkan menjadi satu untuk merumuskan masalah yang terjadi dilapangan secara detail.

#### **3.7.2 Penyajian Data**

Setelah tahap reduksi, tahap selanjutnya adalah menampilkan dan menyajikan data agar memiliki visibilitas yang jelas. Penyajian data ini dapat di kelompokkan dan disederhanakan berdasarkan kategori khusus sesuai dengan objek yang diteliti. Melalui penyajian data ini, data yang diperoleh akan terorganisasi dan tersusun dalam pola yang lebih sederhana sehingga semakin mudah untuk dipahami.

### 3.7.3 Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah menyelesaikan tahapan sebelumnya untuk menganalisis dan meninjau ulang catatan-catatan di lapangan, serta mengidentifikasi masalah yang muncul di lokasi penelitian. Kesimpulan awal yang dilakukan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Apabila bukti yang diperoleh sudah valid dan konsisten saat observasi kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses ini tetap dilakukan hingga penelitian selesai dan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian agar sejalan dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan.

### 3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan jaminan bagi kemantapan hasil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Terdapat beberapa cara yang biasanya dipilih untuk mengukur validitas dan keabsahan suatu data dalam penelitian. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pemanfaatan sumber lain, diluar sumber data untuk keperluan dan pembandingan terhadap data yang diteliti. Pada dasarnya, triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif untuk menarik suatu kesimpulan menggunakan berbagai sudut pandang yang berbeda.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dimana triangulasi ini mengarah pada pengumpulan data yang wajib menggunakan berbagai sumber data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data sejenis. Dengan ini, sumber data lain bisa diuji dan menjadi pembandingan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber yang berbeda. (Damuri et al., 2021).

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Sejarah singkat Desa Sukadadi**

Desa Sukadadi merupakan desa hasil pemekaran wilayah desa Gedung Tataan. Pada tahun 1920, sebagian kecil masyarakat dari desa Gedung Tataan tinggal di kawasan umbulan disekitar sungai Way Semah. Umumnya, masyarakat ini berasal dari suku Jawa/Pendatang, sehingga wilayah tersebut dikenal dengan nama Umbulan Way Semah. Nama Way Semah sendiri di ilhami dari sebuah sungai yang mengalir melalui kampung tersebut. Dalam bahasa Lampung, Way berarti kali/sungai dan Semah yang berarti ikan. Jadi dapat disimpulkan arti kata Way Semah adalah sungai/kali yang banyak ikannya.

Dengan semakin bertambahnya penduduk yang tinggal dan menetap di Umbulan Way Semah, maka pada kisaran tahun 1930 masyarakat Umbulan Way Semah mengusulkan kepada pemerintah desa Gedung Tataan untuk membentuk pemerintahan yang mandiri. Usulan itupun diterima oleh pemerintah dan akhirnya terbentuklah desa Way Semah. Saat itu, kepala desa pertamanya bernama bapak Ahmad Toyin. Lalu pada tahun 1934, kepala desa tersebut meninggal dunia dan jabatan beliau diteruskan oleh bapak Karto Dimejo.

Pada tahun 1936, untuk pertama kalinya desa Way Semah melaksanakan pemilihan kepala desa, yang dalam pemilihan tersebut bapak Ahmad Yamin terpilih sebagai kepala desa. Pada masa baktinya, desa yang semula bernama desa Way Semah disepakati dan berubah menjadi desa Sukadadi. Adapun upacara peresmian nama Sukadadi dilaksanakan pada Bulan Muharram dengan menggelar kesenian daerah Wayang Kulit.

## 4.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis, desa Sukadadi berada di wilayah dataran tinggi dan sebagai salah satu desa penyangga Hutan Kawasan Register 19 Wan Abdul Rahman. Desa Sukadadi termasuk dalam wilayah Kecamatan Gedong Tataan yang memiliki akses ke daerah pegunungan. Desa Sukadadi terletak di antara 105°08'99'' garis Bujur Timur dan 5°40'84'' garis Lintang Selatan yang memiliki topografi dataran tinggi dengan kemiringan rata-rata 20% dan berada pada ketinggian rata-rata 157 dpl dengan bentuk topografi dataran sampai dataran tinggi dan memiliki luas 6.000 Ha dengan batas-batas wilayah administrasi.

Dilihat dari topografi dan kontur tanahnya, Desa Sukadadi memiliki karakteristik yang bervariasi. Sebagian besar wilayah di desa ini berupa dataran tinggi, sehingga kondisi tanah di dataran tinggi ini cenderung bergelombang dan berbukit dengan kemiringan yang bervariasi. Hal ini memberikan potensi untuk pertanian di lahan miring serta kawasan hutan.

**Tabel 9.** Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Sukadadi tahun 2025

<b>Keadaan geografi</b>		<b>Uraian</b>
Topografi sebagian besar wilayah		Dataran
Koordinat		105°08'99''BT dan 5°40'84'' LS
Letak diatas permukaan laut		157 Dpl
Luas Wilayah		6.000 Ha
<b>Batas Wilayah</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Desa Gedong Tataan dan Desa Kutoarjo	Negeri Katon
Sebelah Selatan	Hutan Kawasan Register 19 Wan Abdul Rahman	Waylima
Sebelah Timur	Desa Bogorejo	Kota Bandarlampung
Sebelah Barat	Desa Cipadang dan Desa Gedong Tataan	Gadingrejo

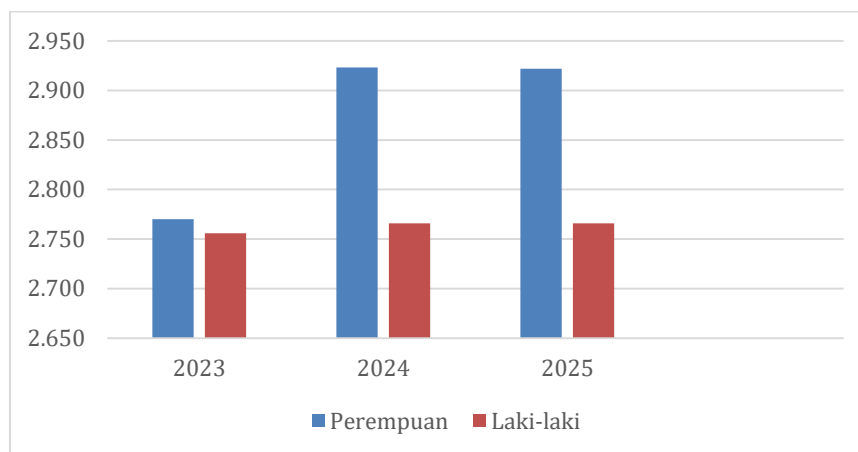
*Sumber: Publikasi Desa Sukadadi dalam angka 2025*

## 4.3 Data Kependudukan

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Data dan informasi kependudukan meliputi

jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang baik dapat menjadi modal pembangunan suatu wilayah, namun jumlah yang besar tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan beban untuk pembangunan.

#### 4.3.1 Jenis Kelamin



*Sumber: Desa Sukadadi (2023-2025)*

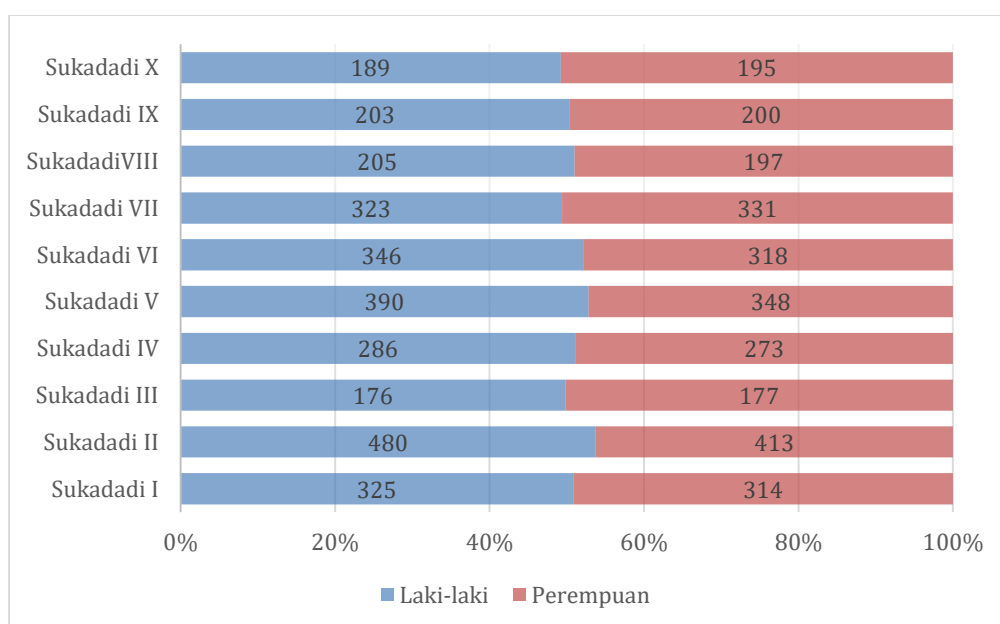
**Gambar 6.** Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2023-2025

Berdasarkan data Desa Sukadadi di (gambar 6), komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Sukadadi menunjukkan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks penelitian, perbedaan peran ini memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi Program Bantuan Sembako. Perempuan pada umumnya berperan sebagai pengelola kebutuhan rumah tangga, termasuk dalam hal pengelolaan bahan pangan. Oleh karena itu, perempuan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat langsung dari bantuan sembako, karena bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa program sembako secara fungsional telah beralih ke kebutuhan dasar rumah tangga.

Sementara itu, laki-laki lebih banyak berperan sebagai pencari nafkah utama. Namun, karena mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sukadadi berada di

sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, maka bantuan sembako menjadi penopang tambahan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dalam konteks implementasi program, perbedaan peran gender ini juga mempengaruhi keberhasilan program. Di satu sisi, keterlibatan perempuan sebagai pengelola bantuan mendukung ketepatan pemanfaatan bantuan. Namun di sisi lain, program ini belum sepenuhnya mendorong pemberdayaan ekonomi, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga masih bersifat konsumtif.

#### 4.3.2 Dusun



*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

**Gambar 7.** Data Penduduk Berdasarkan Dusun tahun 2025

Jika diamati berdasarkan dusun pada (gambar 7), Jumlah dusun di Desa Sukadadi menunjukkan pembagian wilayah administratif yang menjadi dasar dalam pengelolaan data kependudukan serta pelaksanaan program bantuan sosial. Setiap dusun memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga mempengaruhi jumlah dan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam konteks penelitian, keberadaan beberapa dusun ini berpengaruh langsung terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan sembako. Dusun dengan jumlah penduduk lebih banyak atau tingkat

kemiskinan yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah KPM yang lebih besar. Namun, perbedaan kondisi antar dusun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan apabila data yang digunakan tidak akurat dan tidak diperbarui secara berkala.

### 4.3.3 Usia

**Tabel 10.** Data Penduduk berdasarkan Usia tahun 2025

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0 – 12 bulan	29	32	61
2.	1 – 4 tahun	163	136	299
3.	5 – 8 tahun	146	140	286
4.	9 – 13 tahun	197	175	372
5.	14 – 17 tahun	157	139	296
6.	18 – 25 tahun	310	268	578
7.	26 – 32 tahun	326	274	600
8.	33 – 42 tahun	398	349	747
9.	43 – 50 tahun	343	295	638
10.	51 – 60 tahun	338	312	650
11.	61 – 69 tahun	327	322	649
12.	70 – 75 tahun	159	152	311
13.	Lebih dari 75 tahun	21	18	39
<b>Total</b>		<b>2.914</b>	<b>2.612</b>	<b>5.526</b>

*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

Pada (tabel 6), Struktur penduduk berdasarkan usia di Desa Sukadadi menunjukkan komposisi antara usia produktif dan non-produktif yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks penelitian, aspek usia memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan bantuan sosial dan keberhasilan program implementasi Program Bantuan Sembako. Kelompok usia non-produktif, seperti lansia dan anak-anak, usia 0-15 tahun cenderung memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap anggota keluarga yang produktif. Dalam kondisi ini, bantuan sembako menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Sementara itu, kelompok usia produktif, mulai dari usia 16 tahun ke atas sudah mulai berfikir mandiri dan seharusnya sudah memiliki kemampuan

bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, di Desa Sukadadi, masih banyak masyarakat usia produktif yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan mereka tetap masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin, sehingga masih bergantung pada bantuan sembako. Selain itu, variasi usia juga mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program. Masyarakat dengan usia lebih tua cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami system penyaluran yang berbasis administrasi dan teknologi, sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut.

#### 4.3.4 Agama

**Tabel 11.** Data Penduduk berdasarkan Agama tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Penduduk				Total Keseluruhan
	Islam		Kristen		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
2023	2.761	2.741	9	15	5.526
2024	2.914	2.751	9	15	5.569
2025	2.706	2.687	7	6	5.406

*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

Berdasarkan data Desa Sukadadi pada (tabel 7), komposisi penduduk berdasarkan agama di Desa Sukadadi menunjukkan adanya kesamaan nilai keagamaan yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai agama seperti kepedulian sosial, keadilan, dan tolong-menolong memiliki potensi besar dalam mendukung pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk Program Bantuan Sembako. Dalam konteks penelitian, nilai agama seharusnya memperkuat solidaritas sosial antar masyarakat, sehingga program bantuan sembako dapat diterima dengan baik dan didukung secara kolektif. Prinsip keadilan dalam ajaran agama juga mendorong pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Namun, pada kenyataannya, masyarakat masih memiliki kecemburuan sosial akibat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, dimana masyarakat dengan kategori miskin dan rentan miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan nilai-nilai agama yang dianut dengan praktik sosial dilapangan. Selain itu, agama juga berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat terhadap bantuan sosial. Sebagian masyarakat memandang bantuan sebagai bentuk rezeki yang harus diterima, namun di sisi lain ada juga yang memiliki kesadaran untuk tidak bergantung pada bantuan. Dalam implementasi program, aspek agama juga menjadi sarana pendukung sosialisasi program melalui tokoh agama maupun kegiatan keagamaan.

#### 4.4 Pemerintahan

Desa Sukadadi merupakan pemerintahan desa yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Gedong Tataan. Desa Sukdadai memiliki 10 dusun dan 16 Rukun Tetangga (RT). Dusun tersebut yaitu Dusun Sukadadi I, Dusun Sukadadi II, Dusun Sukadadi III, Dusun Sukadadi IV, Dusun Sukadadi V, Dusun Sukadadi VI, Dusun Sukadadi VII, Dusun Sukadadi VIII, Dusun Sukadadi IX, dan Dusun Sukadadi X.

Selama tahun 2023-2025, Desa Sukadadi dipimpin oleh satu kepala desa yang membawahi. 1 sekretaris desa, 3 kepala seksi, 3 kepala urusan, 10 kepala dusun, 16 ketua RT, 12 pegawai desa seperti hansip, serta 9 orang yang menjabat sebagai Badan Permsuyawaratan Desa. Adapun jumlah aparatur pemerintah desa yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 12.** Jumlah Aparatur Desa berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2023-2025

Aparatur Pemerintahan Desa		2023			2024			2025		
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr	
1.	Kepala Desa	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2.	Sekretaris Desa	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3.	Pelaksana Teknis									
	b.Kepala Urusan	1	2	3	1	2	3	1	2	3

	a.Kepala Seksi	3	0	3	3	0	3	3	0	3
4.	Pelaksana Kewilayahan									
	a.Kepala Dusun	10	0	10	10	0	10	10	10	0
	b. Ketua RT	16	0	16	16	0	16	16	0	16
5.	Pegawai Desa Lain	10	2	12	10	2	12	10	2	12
6.	BPD	8	1	9	8	1	9	8	1	9
	<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>55</b>

Sumber: Desa Sukadadi (2025)

Pada (tabel 8), aparatur desa yang tersebar memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Bantuan Sembako, terutama sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat KPM Sembako. Aparatur desa terlibat dalam proses pendataan, verifikasi dan validasi data KPM, serta sosialisasi dan pengawasan distribusi dana bantuan. Pada konteks penelitian, kualitas kinerja aparatur desa sangat menentukan ketepatan sasaran program. Aparatur desa menjadi pihak yang paling memahami kondisi asli masyarakat, yang seharusnya mampu memastikan bahwa data penerima bantuan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonominya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, baik dalam hal pengelolaan data, komunikasi, maupun koordinasi agar program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### 4.5 Pendidikan

**Tabel 13.** Tingkat Pendidikan masyarakat tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	139	119
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	156	121
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	4	3
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	451	461
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	3	11
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat SD/ sederajat	22	25
Tamat SD/ sederajat	571	407
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	20	275

Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	25	7
Tamat SMP/ sederajat	341	321
Tamat SMA/ sederajat	354	390
Tamat D-1/ sederajat	27	13
Tamat D-2/ sederajat	11	34
Tamat D-3/ sederajat	24	17
Tamat S-1/ sederajat	22	12
Tamat S-2/ sederajat	5	0
Jumlah	2.175	2.216

*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

Berdasarkan (tabel 9), tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukadadi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Bantuan Sembako. Pendidikan berperan dalam membentuk pola pikir, kemampuan memahami informasi, serta cara masyarakat dalam merespons kebijakan pemerintah. Dalam konteks penelitian, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami mekanisme program dan cenderung hanya memanfaatkan bantuan secara konsumtif tanpa perencanaan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih bersifat pasif sebagai penerima bantuan tanpa memahami tujuan program secara menyeluruh.

Rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak pada kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dapat memicu terjadinya kesalahpahaman, seperti anggapan bahwa bantuan merupakan hak tetap yang harus diterima secara terus-menerus. Akibatnya, muncul ketergantungan terhadap bantuan sosial dan kurangnya dorongan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

#### **4.6 Kondisi Ekonomi Masyarakat**

Secara ekonomi, masyarakat di desa Sukadadi bekerja pada sektor informal seperti petani, buruh tani, pedagang kecil, ataupun pekerjaan sosial lainnya. Pendapatan masyarakat di Desa ini cenderung tidak tetap karena bergantung pada musim kerja atau peluang pekerjaan yang sedang tersedia. Keterbatasan lapangan pekerjaan serta rendahnya akses terhadap modal usaha menjadi salah

satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fluktuasi harga kebutuhan pokok serta ketergantungan pada sektor pekerjaan yang berpenghasilan rendah menyebabkan daya beli masyarakat relatif terbatas.

#### 4.6.1 Mata Pencaharian Pokok

**Tabel 14.** Data Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan tahun 2025

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	786	52
Buruh Tani	448	125
Pegawai Negeri Sipil	28	21
TNI	12	0
POLRI	5	0
Pengusaha kecil, menengah, dan besar	70	11
Dosen swasta	3	0
Pedagang keliling	34	26
Dukun tradisional	0	3
Karyawan Perusahaan Swasta	61	30
Pumawirawan/Pensiunan	8	5
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	11	20
Jumlah	1.466	293

*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

Berdasarkan (tabel 10), mata pencaharian pokok masyarakat Desa Sukadadi didominasi oleh sektor pertanian, buruh, dan pekerjaan informal yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan tidak tetap dan cenderung rendah. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian, pekerjaan di sektor informal sangat rentan terhadap fluktuasi pendapatan, terutama dipengaruhi oleh musim, ketersediaan pekerjaan, dan kondisi ekonomi. Seperti petani yang sangat bergantung pada hasil panen, dan buruh harian bergantung pada ketersediaan pekerjaan. Ketidakstabilan pendapatan ini menyebabkan banyak masyarakat masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin, sehingga menjadi sasaran utama Program Bantuan Sembako agar dapat meringankan beban pengeluaran ekonomi.

#### 4.6.2 Tenaga Kerja

**Tabel 15.** Data Penduduk Tenaga Kerja berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin tahun 2025

<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Penduduk usia 0-6 tahun	129	123
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	534	411
Penduduk usia 18-56 tahun	469	436
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	536	424
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	442	460
Penduduk usia 56 tahun ke atas	667	731
Jumlah	2.777	2.585

*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

Berdasarkan data pada (tabel 11), tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia kerja dan mampu untuk melakukan pekerjaan agar dapat menghasilkan barang dan jasa. Kondisi tenaga kerja di Desa Sukadadi mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks penelitian, kondisi tenaga kerja ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat berada pada usia produktif, namun tidak semua memiliki pekerjaan yang layak dan stabil. Hal ini menyebabkan banyak rumah tangga masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, sehingga membutuhkan dukungan melalui Program Bantuan Sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan.

Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan di desa juga berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja secara optimal. Sebagian masyarakat yang mengalami pengangguran terselubung atau setengah menganggur, dimana mereka bekerja namun tidak memperoleh penghasilan yang mencukupi. Kondisi ini semakin memperkuat ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dalam implementasi program, kondisi tenaga kerja yang tidak stabil juga menjadi tantangan dalam penentuan penerima bantuan. Perubahan status pekerjaan yang cepat membuat data penerima bantuan berpotensi tidak akurat jika tidak diperbarui secara berkala. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

#### 4.7 Sosial dan Kesejahteraan

Secara sosial, masyarakat Desa Sukadadi memiliki karakteristik hubungan sosial yang relatif kuat dan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, serta gotong-royong. Interaksi yang terjadi antar masyarakat cenderung intens karena sebagian masyarakat mengenal dalam lingkungan yang tidak terlalu luas. Kegiatan sosial seperti kerja bakti, pengajian, arisan, dan kegiatan sosial lainnya masih menjadi sarana yang mempererat solidaritas sosial. Namun, dalam dinamika sosial, juga ditemukan beberapa tantangan, terutama pada aspek pembangunan yang belum memadai. Pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu pembangunan dalam hal pendidikan, kesehatan, ataupun sarana dan prasarana yang bersifat publik.

Dalam penelitian ini, hubungan yang baik antar masyarakat, seperti solidaritas, gotong royong, dan komunikasi yang efektif dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program, khususnya dalam proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Masyarakat yang memiliki hubungan sosial kuat cenderung akan saling berbagi informasi terkait program bantuan sembako sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

##### 4.7.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan

**Tabel 16.** Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2024-2025

No	Jenjang Pendidikan	2024		2025		Total
		Jumlah Lembaga (Unit)				
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	0	0	0	0
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1	3	1	3	4
3	Raudhatul Athfal (RA)/Busthanul Athfal (BA)	0	0	0	0	0

No .	Jenjang Pendidikan	2024		2025		Total
		Jumlah Lembaga (Unit)				
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
4	Sekolah Dasar (SD)	3	0	3	0	3
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0	1	0	1	1
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	0	1	0	1
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0	0	0	0	0
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0	0	0	0	0
9	Madrasah Aliyah (MA)	0	0	0	0	0
10	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0	0	0	0	0
11	Akademi/Perguruan Tinggi	0	0	0	0	0
12	Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB)	0	0	0	0	0
13	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	0	0	0	0	0
14	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	0	0	0	0	0
15	Pondok Pesantren	0	0	0	0	0
16	Madrasah Diniyah	0	0	0	0	0
17	Seminar/Sejenisnya	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Sumber: Desa Sukadadi (2025)

Berdasarkan (tabel 12), Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sukadadi, seperti keberadaan PAUD/TK, sekolah dasar, serta fasilitas pendukung lainnya, merupakan indikator penting dalam melihat tingkat akses pendidikan

masyarakat. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial masyarakat dalam jangka panjang. Keterbatasan fasilitas pendidikan seringkali berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, baik karena biaya maupun keterbatasan fasilitas yang tersedia. Dalam kondisi ini, Program Bantuan Sembako menjadi salah satu bentuk dukungan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, sehingga diharapkan dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan lain, termasuk pendidikan anak.

#### 4.7.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

**Tabel 17.** Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan menurut Jenisnya tahun 2023-2025

No.	Sarana/Prasarana Kesehatan	Satuan	2023	2024	2025
1	Rumah Sakit	Unit	0	0	0
2	Rumah Sakit Bersalin	Unit	0	0	0
3	Puskesmas dengan Rawat Inap	Unit	0	0	0
4	Puskesmas tanpa Rawat Inap	Unit	0	0	0
5	Puskesmas Pembantu	Unit	1	1	1
6	Poliklinik/Balai Pengobatan	Unit	0	0	0
7	Tempat Praktik Dokter	Unit	0	0	0
8	Rumah Bersalin	Unit	0	0	0
9	Tempat Praktik Bidan/Mantri	Unit	3	3	3
10	Poskdes (Pos kesehatan Desa)	Unit	0	0	0
11	Polindes (Pondok Bersalin Desa)	Unit	0	0	0
12	Apotek	Unit	0	0	0
13	Toko Khusus Obat/Jamu	Unit	0	0	0
<b>Total</b>		<b>Unit</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

*Sumber: Data Desa Sukadadi (2025)*

Pada (tabel 13), Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Sukadadi, seperti puskesmas, posyandu, serta fasilitas kesehatan lainnya, merupakan indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian, sarana kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan Program Sembako, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada KPM untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, sehingga mendukung kondisi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan berdampak pada kurang optimalnya pemantauan kondisi gizi masyarakat. Jika fasilitas kesehatan tidak memadai dan kurang dimanfaatkan, maka tujuan bantuan sembako dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak dapat tercapai secara maksimal.

#### 4.7.3 Sarana dan Prasarana Umum

**Tabel 18.** Jumlah Sarana dan Prasarana Umum menurut Jenisnya tahun 2025

No.	Jenis Prasarana Umum	Jumlah
1	Olahraga (lapangan bulu tangkis, lapangan volly dan sepak bola)	7
2	Kesenian/budaya	2
3	Balai pertanian	1
4	Sumur desa	0
5	Pasar desa	0
6	Lainnya	0
<b>Total</b>		<b>10</b>

*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

Dapat dilihat pada (tabel 14), Sarana dan prasarana umum di Desa Sukadadi, seperti sarana olahraga, kesenian dan balai pertanian merupakan faktor pendukung dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan dan kondisi fasilitas ini berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas, distribusi barang, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Dalam konteks penelitian, sarana dan prasarana umum memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program, terutama dalam proses distribusi bantuan kepada masyarakat. Masyarakat yang memiliki akses mudah ke lokasi penyaluran akan lebih cepat menerima dan memanfaatkan bantuan, sedangkan

masyarakat yang berada di wilayah dengan akses terbatas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan secara optimal.

#### 4.7.4 Sarana dan Prasarana Ibadah

**Tabel 19.** Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah menurut Jenisnya tahun 2025

No.	Jenis Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	9
2	Mushola	10
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara	0
6	Klenteng	0
<b>Total</b>		<b>19</b>

*Sumber: Desa Sukadadi (2025)*

Pada (tabel 15), Sarana dan prasarana ibadah di Desa Sukadadi, seperti masjid dan mushola merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, penyebaran informasi, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Dalam konteks penelitian, keberadaan sarana ibadah memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program terutama dalam aspek sosial kemasyarakatan. Tempat ibadah sering menjadi pusat berkumpulnya masyarakat, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai media sosialisasi program dalam penyampaian informasi terkait jadwal penyaluran, mekanisme bantuan, serta kriteria penerima.

Selain itu, nilai-nilai yang berkembang di lingkungan tempat ibadah, seperti keadilan, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama, seharusnya dapat mendukung pelaksanaan program bantuan sembako agar berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Sarana ibadah juga dapat menjadi sarana penguatan solidaritas sosial melalui kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau pertemuan rutin, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya program bantuan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka keseluruhan penelitian dapat disimpulkan bahwa;

1. Implementasi Program Bantuan Sembako di Desa Sukadadi dapat secara fungsional sudah mencapai tujuan program yaitu membantu mengurangi beban pengeluaran pokok KPM. Masyarakat merasakan perubahan ekonomi dengan menghususkan biaya bantuan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur dan minyak, sehingga penghasilan lain yang didapatkan bisa dipakai untuk keperluan mendesak lainnya. Dalam hal ketentuan bantuan, tidak ada hal spesifik mengenai seberapa besar bahan pokok yang akan dibeli. Masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan bahan pokok sesuai dengan kebutuhan dirumah tangga. Implementasi Program ini juga sudah sesuai dengan regulasi dan pedomannya, mulai dari pendataan melalui DTSEN, verifikasi dan validasi data masyarakat KPM, Mekanisme penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi.
2. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Sembako, berupa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat. Faktor Pendukung dalam Implementasi ini didukung oleh koordinasi yang efektif antar pihak pelaksana dan masyarakat KPM, kesesuaian mekanisme penyaluran, ketersediaan infrastuktur yang memadai seperti BRI Link untuk pencairan dana bantuan, serta ketepatan dana bantuan yang mengurangi beban pengeluaran masyarakat KPM. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program, seperti validitas data yang

tidak akurat, kurangnya sosialisasi bagi pihak pelaksana dan penerima bantuan, sehingga pihak pelaksana tidak memiliki kontrol pada dana bantuan apakah masyarakat KPM menggunakan bantuan sebagaimana mestinya, sehingga implementasi program ini secara keseluruhan belum sepenuhnya optimal.

3. Jika dikaitkan dengan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons menggunakan pendekatan AGIL, Program Bantuan Sembako berfungsi sebagai sistem yang mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat (Adaptasi), membantu mencapai tujuan program dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pencapaian Tujuan), menjalin hubungan yang harmonis antar pihak pelaksana dan masyarakat KPM (Integrasi), serta memperkuat nilai kemandirian melalui evaluasi dan monitoring (Pemeliharaan Pola).

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Saran Untuk Pemerintah Desa Sukadadi**

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana yang sudah dicantumkan pada skripsi ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Sembako dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Sukadadi, sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa diharapkan dapat melakukan pendataan yang lebih akurat dan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerimaan bantuan.
2. Pemerintah Desa disarankan untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak pelaksana agar bantuan yang disalurkan lebih terintegrasi
3. Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan sosialisasi khusus terkait program bantuan yang diberikan sehingga

masyarakat memahami mekanisme bantuan dan menjadi solidaritas sosial dilingkungan desa.

### **6.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya**

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dalam bidang sosiologi, disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan lebih luas dengan membandingkan beberapa desa/wilayah lain sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan bantuan.
2. Disarankan menggunakan pendekatan teori lain selain konsep AGIL dari Talcott Parsons sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih beragam dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina I, Bangsu T., M. A. (2025). Implementasi Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S- 171/MS/BS.00.01/2/2023 Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 2808–1307. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh> Email: jurnal.ajsh
- Alfarishi, S. U. (2021). Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi Universitas Medan Area*, 87. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16063%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16063/2/178520017> - Siti Ulfa Alfarishi - Fulltext.pdf
- Apriyani, R. (2024). Implementasi Program Penerimaan Bantuan Sembako Desa Gentawangi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. *MIDA Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi Volume 21, 21(2)*, ISSN 1411-4461.
- Aras, & Prasetyo, K. B. (2025). Transformasi Digital Di Pedesaan: Peran Bumdes Dalam Penguatan Akses Internet Warga Desa Krocok Kabupaten Blora. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 8(2), ISSN 2599-3259. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v8i2.30430>
- Ariyanti, Marleni, M. P. (2022). Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan pada siswa kelas I di sd Negeri 10 Palembang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 1450–1455.
- Damuri, A., Riyanto, U., Rusdianto, H., & Aminudin, M. (2021). Implementasi Data Mining dengan Algoritma Naïve Bayes Untuk Klasifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sembako. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 219–225. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3655>
- Husna H., & Ariyani E, Azwari, T. (2021). Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 57–63.

- Istyawan, A., Yuliani, D., & Haryani, A. (2025). *Manfaat Program Sembako Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin : Studi Deskriptif Di Kelurahan Sukabungah*. 4(2), 159–168.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako*. Kementerian Sosial RI. 1–49.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2024 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Kementerian Sosial RI. 1–25.
- Lestari, P. I., & Robiani, B. (2023). Kemiskinan Ekstrem , Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1739–1752.
- Mansur, Y. (2024). *Analisis Perkembangan Penduduk Miskin , Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia*. 8(1), 18–31.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press* (April 2020). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press.
- Nurhayati, H. S. (2022). Implementasi Program Sembako di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Begadai. *Skripsi. FISIP. Universitas Medan Area*.
- Nurkhaini, S., S, N., Hasrul, H., & Indrawadi, J. (2023). Implementasi program sembako di desa. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 82–88. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.90>
- Prayogi, O. (2024). Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), E-ISSN : 2830-7690. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1103>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Rizqiawan, A., Alisyah, P., Gizi, P. S., Binawan, U., Gizi, P. S., & Binawan, U. (2022). *The Relationship Of The Implementation Of The Principles Of*. 4, 21–27.

- Sanjaya, P. N., Melia, S., Pratama, S. A., Arief, S., Atmaji, D., & Hasanah, U. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan, Ketimpangan Dan Pengangguran di Indonesia. *Salam: Islamic Economics Journal*, 3(I), 41–61.
- Sari, D. P., Astuti, W., & Dzulfikry, N. (2023). *Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas*. 1(1), 47–54.
- Sifa L.N., Prasetya S., M. P. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Bidang Penanganan Fakir Miskin (studi pada dinas sosial kab. kediri). *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.xxx.
- Siti Alifa Fentiani, Yani Achdiani, & Gina Indah Permata Nastia. (2025). Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS FISIP UNPAS*, 7(1).  
<https://doi.org/10.23969/humanitas.v7i1.21718>
- sukadadi 2025. (2025). *Publikasi Desa Sukadadi dalam Indografis 2025*.
- Suparti, H. ; H. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Pada Kantor Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.  
<Http://Jurnal.Stiatabalong.Ac.Id/Index.Php/JAPB>, 6(2014), 1025–1036.
- Susiloadi, D. T. S. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2020-2021. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 85–100.  
<https://doi.org/10.31506/jap.v14i1.17554>
- Wijayanti, H. P., Rezqiana, A., Al, G., Shahdan, N., Adzkiya, A., Daryono, A., Mada, U. G., Sleman, K., & Yogyakarta, D. I. (2025). *Indonesia Melalui Pendekatan Regresi Logistik*. 3(6).